

# INDIKATOR PASAR TENAGA KERJA PROVINSI PAPUA 2019

<https://papua.bps.go.id>



**INDIKATOR**  
**PASAR**  
**TENAGA**  
**KERJA**  
**PROVINSI PAPUA**  
**2019**



## INDIKATOR PASAR TENAGA KERJA PROVINSI PAPUA 2019

**ISBN** : 978-602-0963-53-2  
**No. Publikasi** : 94520.2004  
**Katalog BPS** : 2302004.94  
**Ukuran Buku** : A4 (21 x 29,7 cm)  
**Jumlah Halaman** : x+76 Halaman

**Tim Penyusun:**

Bagas Susilo, Paul Santoso, Aditya Hans Pradipta

**Naskah:**

Seksi Statistik Kependudukan - Bidang Statistik Sosial

**Gambar Kulit:**

Seksi Statistik Kependudukan - Bidang Statistik Sosial

**Diterbitkan Oleh:**

Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

*Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik*

## ORGANISASI PENULISAN

### **Penanggung Jawab**

Adriana Helena Carolina, S.E., M.M.

### **Editor**

Bagas Susilo, S.ST.,M.Si.

### **Pengolah Data**

Paul Santoso, S.ST.

Aditya Hans Pradipta, S.ST.

### **Penulis**

Aditya Hans Pradipta, S.ST.

### **Layout**

Aditya Hans Pradipta, S.ST.

### **Desain Cover**

Aditya Hans Pradipta, S.ST.

<https://papua.bps.go.id>



## KATA PENGANTAR

Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) adalah survei yang mencakup seluruh wilayah Indonesia dan diharapkan dapat memonitor dinamika ketenagakerjaan secara lebih cepat dan berkesinambungan. Sakernas Semester I (Februari) dapat menghasilkan angka estimasi nasional sampai dengan level provinsi, sedangkan Sakernas Semester II (Agustus) dengan jumlah sampel yang lebih banyak mampu menyajikan angka estimasi hingga tingkat kabupaten/kota.

Pada tahun 2020, BPS Provinsi Papua menerbitkan publikasi Indikator Pasar Tenaga Kerja Papua dengan kondisi Agustus 2019. Dalam publikasi ini menyajikan *Key Indicator of the Labour Market* (KILM) yang merupakan Indikator-indikator yang direkomendasikan ILO, dengan harapan bisa dijadikan sebagai sistem peringatan dini mengenai kondisi pasar tenaga kerja di Provinsi Papua. Jenis tabel yang ditampilkan dalam publikasi ini dirinci menurut jenis kelamin, klasifikasi perkotaan dan perdesaan, serta hanya mencakup penduduk usia kerja. Beberapa indikator KILM menurut kabupaten/kota dan tabel pendukung dalam indikator KILM yang ditetapkan, disajikan pada lampiran publikasi ini.

Kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya publikasi ini, disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih. Kritik dan saran dari pengguna sangat diharapkan demi penyesuaian terhadap publikasi edisi berikutnya.

Jayapura, Agustus 2020

**Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Papua,**



**Adriana Helena Carolina, S.E., M.M.**

**NIP. 19660408 199212 2 001**

## DAFTAR ISI

<b>Organisasi Penulisan</b>	iii
<b>Kata Pengantar</b>	v
<b>Daftar Isi</b>	vi
<b>Daftar Tabel</b>	vii
<b>Daftar Gambar</b>	viii
<b>Daftar Lampiran</b>	ix
<b>Daftar Istilah dan Singkatan</b>	x
<b>Bab 1 Pendahuluan</b>	1
1.1 Sakernas dan Analisis Ketenagakerjaan	2
1.2 Sakernas dan KILM	3
1.3 Peran KILM dalam Ketenagakerjaan	5
1.4 Analisis Pasar Tenaga Kerja Menggunakan KILM	6
<b>Bab 2 Penjelasan Teknis</b>	9
2.1 Penjelasan Umum	9
2.2 Indikator Pasar Tenaga Kerja	12
2.2.1 Partisipasi di Dunia Kerja	13
2.2.2 Indikator Pekerja	14
2.2.3 Indikator Pengangguran, <i>Under-Employment</i> , dan Ketidakaktifan	17
2.2.4 Indikator Pendidikan dan Melek Huruf	20
2.2.5 Indikator Upah dan Biaya Tenaga Kerja	20
<b>Bab 3 Indikator Pasar Tenaga Kerja</b>	23
3.1 Partisipasi di Dunia Kerja	23
3.2 Indikator Pekerja	27
3.3 Indikator Pengangguran, <i>Under-Employment</i> , dan Ketidakaktifan	42
3.4 Indikator Pendidikan dan Melek Huruf	51
<b>Lampiran</b>	53

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Sakernas Tahun 2017-2019	24
Tabel 2	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kelompok Umur, 2017-2019	28
Tabel 3	Rasio Penduduk Bekerja (EPR) terhadap Total Penduduk Usia Kerja, 2017-2019	29
Tabel 4	Jumlah dan Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, 2018-2019	31
Tabel 5	Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan, 2018-2019	34
Tabel 6	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Penggunaan Waktu, 2018-2019	36
Tabel 7	Penduduk Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja, 2019	38
Tabel 8	Jumlah dan Persentase Pekerja Menurut Sektor, 2018-2019	39
Tabel 9	Indikator Pengangguran Papua, 2018-2019	43
Tabel 10	Indikator Pengangguran Usia Muda di Papua, 2018-2019	45
Tabel 11	TPT Menurut Tingkat Pendidikan, 2018-2019	47
Tabel 12	Indikator Setengah Penganggur, 2018-2019	49
Tabel 13	Indikator Ketidakaktifan, 2018-2019	50
Tabel 14	Indikator Ketidakaktifan Menurut Pendidikan, 2018-2019	52

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Diagram Ketenagakerjaan	9
Gambar 2	Pola TPAK Menurut Kelompok Umur, 2018-2019	25
Gambar 3	TPAK Menurut Kabupaten/Kota Agustus 2019	26
Gambar 4	Pola EPR Menurut Kelompok Umur Agustus 2019	29
Gambar 5	Pola EPR Kabupaten/Kota, Agustus 2019	30
Gambar 6	Penduduk 15 Tahun Ke Atas Yang Termasuk Pekerja Rentan Menurut Kabupaten/Kota, 2019	33
Gambar 7	Persentase Pekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Kabupaten/Kota, 2019	35
Gambar 8	Tingkat Pekerja Paruh Waktu Menurut Kabupaten/Kota, 2019	37
Gambar 9	Persentase Pekerja Menurut Jumlah Jam Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2019	39
Gambar 10	Persentase Pekerja Menurut Sektor dan Kabupaten/Kota, 2019	41
Gambar 11	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota	44
Gambar 12	Persentase Pengangguran Menurut Tingkat Pendidikan dan Kabupaten/Kota, 2019	48
Gambar 13	Pola Tingkat Ketidaktifan Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2019	51

## LAMPIRAN

Lampiran 1	Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Tahun 2018	54
Lampiran 2	Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Menurut Kelompok Umur Tahun 2017 dan 2018	55
Lampiran 3	Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2018	56
Lampiran 4	Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur, 2017 - 2018	57
Lampiran 5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2018	58
Lampiran 6	Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2018	59
Lampiran 7	Ratio Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk (EPR) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2018	60
Lampiran 8	Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pekerjaan Utama, 2018	61
Lampiran 9	Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pekerjaan Utama, 2018	63
Lampiran 10	Indikator Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Yang Termasuk Pekerja Paruh Waktu Menurut Kabupaten/Kota, 2018	64
Lampiran 11	Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jumlah Jam Kerja, 2018	65
Lampiran 12	Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Sektor Formal-Informal, 2018	68
Lampiran 13	Pola Tingkat Ketidaktifan Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2019	69
Lampiran 14	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Pendidikan, 2018	70
Lampiran 15	Persentase Pengangguran Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Pendidikan, 2018	71
Lampiran 16	Persentase Setengah Penganggur Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Pendidikan, 2018	72
Lampiran 17	Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Yang Termasuk Bukan Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018	73
Lampiran 18	Tingkat Ketidaktifan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, Tahun 2018	74
Lampiran 19	Persentase Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Pendidikan, 2018	75
Lampiran 20	Tabulasi Silang Batas Kegiatan Formal dan Informal Berdasarkan Status Pekerjaan dan Jenis Pekerjaan Utama	76

## DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN (AKRONIM)

<b>AK</b>	Angkatan Kerja
<b>BAK</b>	Bukan Angkatan Kerja
<b>BPS</b>	Badan Pusat Statistik
<b>EPR</b>	<i>Employment-to-Population Ratio</i>
<b>ICLS</b>	<i>The International Conference of Labour Statisticians</i>
<b>ILO</b>	<i>International Labor Organization</i>
<b>ISCED</b>	<i>International Standard Classification of Education</i>
<b>ISIC</b>	<i>International Standard Industrial Classification</i>
<b>KBLI</b>	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
<b>KILM</b>	<i>Key Indicator of The Labor Market</i>
<b>MDG's</b>	<i>Millenium Development Goals</i>
<b>OECD</b>	<i>Organisation for Economic Co-Operation and Development</i>
<b>Sakernas</b>	Survei Angkatan kerja Nasional
<b>SP</b>	Sensus Penduduk
<b>STP</b>	Setengah Penganggur
<b>SUPAS</b>	Survey Penduduk Antar Sensus
<b>TPT</b>	Tingkat Pengangguran Terbuka
<b>TPAK</b>	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Data ketenagakerjaan semakin dibutuhkan guna memberikan gambaran mengenai indikator pasar tenaga kerja. Data tersebut dihimpun melalui kegiatan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang rutin dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik. Sakernas tahun 2015-2019 kembali dilaksanakan secara semesteran. Angka estimasi Sakernas semester I mampu menggambarkan indikator pada level provinsi. Pada pelaksanaan semester II (bulan Agustus) dengan penambahan sampel komplemen, estimasi sakernas mampu memberikan deskripsi hingga level kabupaten/kota. BPS Provinsi Papua menyusun publikasi yang merujuk pada publikasi Organisasi Buruh Internasional (*International Labor Organization - ILO*) yaitu publikasi Indikator Kunci Pasar Tenaga Kerja / KILM (*Key Indicator of the Labor Market*). ILO telah meluncurkan Indikator Kunci Pasar Tenaga Kerja / KILM pada tahun 1999 untuk melengkapi program regular pengumpulan data dan untuk meningkatkan penyebaran data pada elemen kunci dari pasar tenaga kerja dunia. Edisi KILM Papua ini merujuk pada KILM yang diterbitkan BPS RI pada tahun 2011.

Adapun data dan indikator ketenagakerjaan yang disajikan dalam publikasi ini merujuk pada hasil Sakernas tahun 2017-2018. Indikator ketenagakerjaan pada level kabupaten/kota juga disajikan. Sebagaimana dijelaskan bahwa pelaksanaan Sakernas semester 2 (bulan Agustus) dengan penambahan sampel komplemen, mampu memberikan deskripsi hingga level kabupaten/kota. Dalam kondisi tertentu karena faktor lapangan dan responden, sehingga suatu kabupaten tidak dapat memenuhi target minimum sampel rumah tangga. Kondisi ini menyebabkan data tidak tersedia karena sampel tidak mencukupi untuk estimasi level kabupaten.

## 1.1. SAKERNAS DAN ANALISIS KETENAGAKERJAAN

Untuk memperoleh data ketenagakerjaan, Badan Pusat Statistik (BPS) melaksanakan sensus dan survey seperti: Sensus Penduduk (SP) Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), Survei Ekonomi Sosial Nasional (SUSENAS) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS). Survei yang dirancang khusus untuk mengumpulkan data yang menggambarkan keadaan ketenagakerjaan antar periode pencacahan adalah SAKERNAS.

Sakernas pertamakali dilaksanakan pada tahun 1976. Berbagai perubahan metodologi ataupun periode pencacahan telah terjadi. Tahun 1986 sampai 1993, Sakernas dilaksanakan secara triwulanan. Sejak tahun 1994 hingga 2001 dilaksanakan secara tahunan setiap bulan Agustus. Kemudian pada tahun 2002 sampai dengan 2004, selain dilaksanakan setiap tahun juga dilaksanakan secara triwulanan. Dan mulai tahun 2005 sampai tahun 2010 Sakernas berlangsung secara semesteran yaitu setiap bulan Februari dan Agustus.

Dengan semakin mendesaknya tuntutan data ketenagakerjaan baik variasi, kontinuitas, kemutakhiran dan keakuratan data yang dihasilkan, maka pengumpulan data Sakernas pada tahun 2011 dilakukan secara triwulanan yaitu bulan Februari, Mei, Agustus dan November yang dirancang untuk estimasi level provinsi. Sedangkan untuk estimasi level kabupaten/kota, pada triwulan 3 (bulan Agustus) ditambah sampel komplemen. Selanjutnya, Mulai tahun 2015 Sakernas kembali dilaksanakan secara semesteran yaitu pada bulan Februari (Sakernas Semester I) untuk mendapatkan estimasi hingga tingkat provinsi. Pada bulan Agustus, selain sampel Sakernas Semester II terdapat sampel tambahan untuk memperoleh estimasi penyajian data hingga tingkat Kabupaten/Kota.

Tujuan pengumpulan data Sakernas adalah menyediakan data pokok ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Dan secara khusus, ingin memperoleh informasi jumlah penduduk yang bekerja, pengangguran dan penduduk yang pernah berhenti/pindah bekerja serta perkembangan di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional.

Sepanjang tahun 2011 Sakernas dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia dengan jumlah sampel sekitar 50.000 rumahtangga (Sakernas triwulanan) dan 200.000 rumahtangga (Sakernas Agustus). Untuk Sakernas Agustus, jumlah sampel tersebar pada 20.000 blok sensus (BS) baik daerah perkotaan maupun perdesaan. Dari 20.000 BS tersebut terbagi menjadi 5.000 BS triwulan 3 dan 15.000 sisanya adalah blok sensus tambahan. Penambahan ini bertujuan untuk mampu mengestimasi data hingga level kabupaten/kota. Sebagai catatan, rumahtangga korps diplomatik, rumahtangga yang tinggal di blok sensus khusus, rumahtangga khusus di bok sensus biasa tidak terpilih sebagai sampel. Di provinsi Papua sendiri, Sakernas dilaksanakan pada 204 blok sensus triwulanan untuk level provinsi dan pada pelaksanaan Agustus ditambah 612 blok sensus menjadi 816 blok sensus sampel untuk estimasi level kabupaten/kota. Total rumahtangga sampel untuk pelaksanaan Agustus sebesar 8160 rumahtangga.

Dari setiap rumahtangga terpilih dikumpulkan keterangan mengenai keadaan umum setiap anggota rumahtangga (ART) meliputi nama, hubungan dengan kepala rumahtangga, jenis kelamin dan umur. Khusus untuk ART yang berusia 10 tahun ke atas ditanyakan keterangan mengenai status perkawinan, pendidikan, pekerjaan, pengangguran dan pengalaman kerja.

## 1.2 SAKERNAS DAN KILM

Dari berbagai macam variabel yang dikumpulkan oleh Sakernas, dapat disusun serangkaian indikator kunci yang merujuk pada publikasi internasional (ILO) yaitu KILM. Namun, yang perlu menjadi catatan adalah, pada saat melakukan interpretasi data hasil Sakernas dengan data ketenagakerjaan dari sumber lain (SP dan SUPAS) perlu memperhatikan beberapa hal, karena data-data tersebut tidak dapat dibandingkan secara langsung. Beberapa faktor perlu dipertimbangkan oleh para pemakai data dalam menginterpretasikan dan menganalisa data ketenagakerjaan. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan meliputi:

### 1. Tujuan Survei

Sakernas merupakan survei khusus untuk mengumpulkan data ketenagakerjaan. Sedangkan SP maupun SUPAS bertujuan untuk mengetahui sifat demografi secara umum. Dengan demikian informasi yang dikumpulkan dalam SP dan Supas lebih banyak dan beragam, antara lain meliputi data pendidikan, migrasi dan ketenagakerjaan. Begitu pula informasi yang dikumpulkan melalui Susenas lebih beragam sifatnya seperti data pengeluaran/konsumsi, kesehatan, perumahan, ketenagakerjaan. Perbedaan tujuan ini menyebabkan kualitas data ketenagakerjaan antar berbagai survey relatif tidak sama.

### 2. Ukuran Sampel

Ukuran sampel Sakernas dan Supas atau Susenas tidak sama. Perbedaan ini mengakibatkan *sampling error* yang dikandung angka estimasi dari masing-masing sumber data juga berbeda. Semakin kecil ukuran sampel, semakin besar *sampling error*-nya.

### 3. Faktor Pengali

Faktor pengali yang digunakan dalam publikasi ini, berdasarkan jumlah penduduk hasil SP2010 yang diproyeksi ke bulan Agustus 2015

### 4. Kualitas Petugas Lapangan

Sampai dengan semester II (Agustus) 2006, Sakernas dikerjakan oleh pencacah dan pengawas/pemeriksa. Mulai semester I (Februari) 2007 hingga semester II (Agustus) 2010 pencacahan dilakukan secara tim yang terdiri dari 2 pencacah dan 1 koordinator tim. Petugas tersebut pada umumnya adalah pegawai BPS yang ada di kecamatan (Koordinator Statistik Kecamatan/KSK) dan pegawai BPS kabupaten/kota. Pengalaman mereka sudah banyak sehingga menguasai medan/lapangan dan memahami dengan baik konsep dan definisi terkait kuesioner

Sakernas. Sejak tahun 2011, Sakernas tidak dilakukan secara tim lagi dan kembali dicacah secara individu. Setiap pengawas meng-*handle* 2-3 orang pencacah.

#### 5. Perencanaan Kuesioner

Cara menyusun pertanyaan mengenai ketenagakerjaan dalam kuesioner dapat berpengaruh terhadap hasil survei maupun sensus. Ini meliputi bentuk kalimat/pertanyaan yang tertulis, urutan pertanyaan, pemilihan kata-kata yang tepat dalam pertanyaan, dan banyaknya pertanyaan maupun jenis keterangan yang ditanyakan. Dalam Sakernas, telah diusahakan bentuknya ringkas/ sederhana, mudah dimengerti serta pertanyaan pokoknya tidak berubah-ubah.

#### 6. Waktu Pelaksanaan/Pencacahan

Waktu pelaksanaan lapangan antara Sakernas, Susenas, Sensus Penduduk, dan Supas berbeda. Hal inilah yang menyebabkan perbedaan hasil yang diperoleh karena pengaruh musimannya. Mengingat bahwa sejak tahun 2011 Sakernas telah dilakukan secara triwulanan yang selanjutnya menjadi semesteran pada tahun 2015 dengan maksud sebagai *early warning system* di bidang ketenagakerjaan, perlu untuk menyusun rangkaian indikator ketenagakerjaan dengan memanfaatkan data Sakernas tersebut. Di samping itu, penyusunan indikator kunci ketenagakerjaan /KILM pada awalnya dirancang dengan dua tujuan utama yaitu:

- 1) Menyajikan indikator inti pasar tenaga kerja;
- 2) Meningkatkan ketersediaan indikator-indikator ketenagakerjaan untuk memantau perkembangan para tenaga kerja terkini. Indikator-indikator ini merupakan hasil kolaborasi yang melibatkan ILO bersama para ahli dari Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (*Organization for Economic Co-operation and Development-OECD*) dan beberapa perwakilan nasional dari departemen Tenaga kerja dan kantor statistik berbagai negara.

### 1.3 PERAN KILM DALAM KETENAGAKERJAAN

Identifikasi dan kuantifikasi *inefisiensi* dalam pasar tenaga kerja seperti *underutilization* tenaga kerja dan defisit pekerjaan layak (*decent work*) adalah langkah pertama dalam merancang kebijakan ketenagakerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Pandangan luas dunia kerja menuntut pengumpulan data yang lengkap, pengorganisasian dan analisa informasi pasar tenaga kerja. Dalam konteks ini, KILM dapat berfungsi sebagai alat dalam memantau dan menilai banyak hal yang terkait dengan fungsi pasar tenaga kerja. Berikut ini adalah beberapa contoh bagaimana KILM dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan di bidang ketenagakerjaan.

Beberapa peran KILM dalam analisis pasar tenaga kerja antara lain:

1) Mempromosikan Agenda ILO: Pekerjaan yang Layak (*Decent Work*).

Salah satu tujuan agenda ILO adalah mempromosikan pekerjaan yang layak yang memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pekerjaan produktif dalam kondisi kebebasan, kesetaraan, dan keamanan. Penerapan konsep layak untuk segala bentuk kegiatan ekonomi merupakan suatu multitafsir. Persepsi setiap orang mengenai upah yang layak dapat berbeda secara signifikan.

Selain pekerjaan layak, permasalahan yang muncul dalam dunia ketenagakerjaan adalah kurangnya kesempatan kerja. Ini diidentifikasi menggunakan pendekatan indikator pengangguran (KILM 8 dan KILM 9), tetapi juga bisa menggunakan indikator yang lebih rinci yaitu tingkat ketidakaktifan (KILM 13). Untuk mengetahui kualitas dan jenis pekerjaan dapat dilakukan pendekatan melalui identifikasi kelompok pekerja rentan (*vulnerable employment*), yaitu pekerja berdasarkan status dan sektor (KILM 3 dan KILM 4), jam kerja yang berlebih /*exceeds working hours* (KILM 6), pekerja sektor informal (KILM 7) dan setengah penganggur (KILM 12).

2) Pemantauan pencapaian Tujuan Pembangunan Milineum (MDG's).

Tujuan utama kebijakan nasional serta strategi nasional pembangunan sebagai bagian dari upaya untuk mencapai Tujuan Pembangunan Milenium (MDG's) adalah meningkatnya jumlah pekerja penuh waktu (*full employment*), pekerja yang produktif dan penyediaan pekerjaan yang layak (*decent work*) untuk semua. Pekerjaan yang layak dan produktif bagi semua merupakan isu sentral untuk mengatasi kemiskinan dan kelaparan. MDG pertama memasukan target baru 1b (disepakati pada tahun 2008) yaitu "mencapai pekerja penuh dan layak bagi semua, termasuk perempuan dan orang-orang muda". Empat indikator yang dipilih untuk memantau kemajuan menuju sasaran 1b dalam MDG's tersedia dalam KILM, yaitu rasio penduduk bekerja terhadap total penduduk (*employment*

*to population ratio / EPR*), proporsi pekerja yang hidup di bawah garis kemiskinan, tingkat pekerja rentan (*vulnerable employment*), dan tingkat pertumbuhan produktifitas tenaga kerja, sesuai dengan indikator KILM 2, KILM 3, KILM 18 dan KILM 20.

3) Memantau kesetaraan gender di pasar tenaga kerja.

Wanita menghadapi tantangan khusus dalam mencapai pekerjaan yang layak. Sebagian besar indikator KILM dipisahkan menurut jenis kelamin yang memungkinkan untuk melakukan perbandingan kesempatan kerja bagi laki-laki dan perempuan.

4) Mengkaji tenaga kerja di era globalisasi.

Globalisasi memiliki potensi manfaat bagi semua, namun hingga saat ini hal tersebut tidak mencakup orang banyak. Oleh karena itu, perlu satu cara untuk menghadapi era globalisasi dengan tetap mendorong penciptaan kesempatan kerja yang layak untuk semua. Salah satu cara untuk melakukannya adalah membuat tenaga kerja menjadi tujuan sentral dari kebijakan ekonomi makro dan sosial. Indikator KILM dapat bermanfaat dalam hal ini dengan memonitor dinamika ketenagakerjaan yang terkait dengan globalisasi. Misalnya, ada penelitian yang menunjukkan bahwa kehilangan pekerjaan/penciptaan serta perubahan upah dan produktifitas dipengaruhi oleh globalisasi. Jika indikator mencerminkan konsekuensi negatif dari globalisasi, maka pembuat kebijakan memiliki pilihan untuk mengubah kebijakan ekonomi makro sehingga dapat meminimalkan biaya penyesuaian (*adjustment cost*) dan mendistribusikan keuntungan dari globalisasi secara lebih adil.

#### 1.4 ANALISIS PASAR TENAGA KERJA MENGGUNAKAN KILM

Saat ini semakin banyak negara yang mempublikasikan angka pengangguran nasional dan data ketenagakerjaan secara agregat. Salah satu keuntungan menggunakan data agregat adalah relatif lebih mudahnya melakukan perbandingan antar wilayah. Contohnya tingkat pengangguran, bisa dibandingkan antar daerah. Untuk melihat kondisi ketenagakerjaan suatu wilayah tidak hanya saja mengamati tingkat pengangguran, tetapi harus melihat unsur-unsur pasar tenaga kerja lainnya. Oleh karena itu, dalam menganalisis pasar tenaga kerja yang perlu dilakukan pertama kali adalah menentukan rincian status tenaga kerja dalam populasi. Pengelompokan penduduk usia kerja menjadi penduduk yang tidak aktif secara ekonomi (di luar tenaga kerja dan bukan angkatan kerja, KILM 13); penduduk yang bekerja (KILM 2) atau tidak bekerja dan mencari pekerjaan (menganggur, KILM 8). Semakin besar penduduk yang masuk dalam kelompok pengangguran atau bukan angkatan kerja, atau keduanya, menunjukkan underutilisasi yang besar dari angkatan kerja yang potensial. Pemerintah yang menghadapi situasi ini semestinya berusaha untuk menganalisis alasan untuk tidak aktif, yang pada gilirannya bisa menentukan pilihan kebijakan yang penting untuk mengubah situasi.

Jika mayoritas penduduk aktif terdiri dari perempuan yang tidak bekerja karena mereka memiliki tanggungjawab rumahtangga, pemerintah mungkin ingin mendorong lingkungan yang memfasilitasi partisipasi ekonomi perempuan melalui misalnya, pembentukan pusat-pusat penitipan anak atau jam kerja fleksibel bagi perempuan atau program untuk menggalakkan pekerjaan pada penyandang cacat dapat membantu menurunkan tingkat ketidakaktifan, jika cacat adalah alasan umum untuk tidak aktif. Hal yang lebih sulit adalah mengembalikan orang yang telah meninggalkan pasar kerja ke dalam angkatan kerja karena alasan “putus asa” / *discourage worker*, yaitu karena merasa tidak ada lagi pekerjaan yang sesuai dan tersedia bagi mereka, dan mereka tidak memiliki kualifikasi yang tepat, atau karena mereka tidak tahu ke mana harus mencari pekerjaan.

Pengangguran juga harus dianalisis menurut jenis kelamin (KILM 8), usia (KILM 9), lamanya menganggur (KILM 10) dan tingkat pendidikan (KILM 11) untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dari komposisi pengangguran sehingga bisa menentukan kebijakan pengangguran yang tepat. Karakteristik lain dari pengangguran yang tidak ditampilkan dalam KILM, seperti latar belakang sosial ekonomi, pengalaman kerja, dll, juga penting untuk dianalisa. Jika data tersebut tersedia dapat digunakan untuk menentukan kelompok mana yang mengalami kesulitan tertentu. Paradoksnya, tingkat pengangguran yang rendah mungkin menyamarkan tingkat kemiskinan dalam satu negara (KILM 20), sedangkan tingkat pengangguran tinggi dapat terjadi di negara-negara dengan perkembangan ekonomi yang signifikan dengan insiden kemiskinan rendah. Di negara-negara berkembang dengan skema ketersediaan perlindungan sosial yang baik atau bila terdapat berbagai jaminan sosial atau dukungan yang tersedia, maka pekerja dapat lebih mampu meluangkan waktu untuk mencari pekerjaan yang diinginkan. Oleh karena itu, masalah di banyak negara berkembang bukanlah tingkat pengangguran yang tinggi, melainkan kurangnya kesempatan kerja yang layak dan produktif bagi mereka yang bekerja.

Hal ini membawa kita pada kebutuhan untuk membedah jumlah total lapangan kerja serta untuk menilai kesejahteraan penduduk yang bekerja, di bawah suatu konsep bahwa tidak semua pekerjaan adalah “pekerjaan yang layak”. Jika penduduk yang bekerja terdiri dari sebagian besar bekerja sendiri atau pekerja keluarga (lihat KILM 3), lalu dibandingkan dengan total penduduk yang bekerja (KILM 2), apakah indikator ini akan kehilangan nilainya sebagai ukuran nominatif? Apakah orang-orang ini bekerja? Ya, menurut definisi internasional. Apakah mereka dalam pekerjaan yang layak? Mungkin tidak. Meskipun secara teknis bekerja, beberapa pekerja yang berusaha sendiri atau pekerja keluarga akan bertahan pada pekerjaan mereka saat ini sehingga batas antara bekerja dan menganggur menjadi sangat tipis. Hal ini terlihat ketika terbuka lowongan pekerjaan yang bergaji (buruh/karyawan/pegawai) di kegiatan ekonomi formal, rombongan tenaga kerja akan berlomba-lomba mengisi kesempatan itu.

Identifikasi lebih lanjut harus dilakukan untuk menentukan apakah penduduk bekerja tersebut umumnya miskin (KILM 20), terlibat dalam kegiatan pertanian tradisional (KILM 4), menjual barang-barang di pasar informal tanpa keamanan kerja (KILM 7), jam kerja yang berlebihan (KILM 6) atau ingin memperoleh pekerjaan tambahan (KILM 12).

<https://papua.bps.go.id>

## BAB 2

### PENJELASAN TEKNIS

Pada subbab ini, akan disampaikan penjelasan teknis terkait dengan konsep dan definisi yang digunakan dalam Sakernas maupun konsep dan definisi yang digunakan dalam KILM.

#### 2.1 PENJELASAN UMUM

Sejauh ini sumber data makro mengenai situasi ketenagakerjaan yang secara luas dianggap paling kredibel adalah berasal dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS). Suatu survei yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik secara rutin dalam mengintegrasikan data ketenagakerjaan yang mempunyai peran penting, karena dirancang khusus untuk mengumpulkan data yang menggambarkan keadaan umum ketenagakerjaan antar periode survei.

Konsep dan definisi yang digunakan dalam pengumpulan data ketenagakerjaan oleh Badan Pusat Statistik mengacu pada *The Labour Force Concept* yang disarankan oleh *International Labour Organization* (ILO) seperti yang tercantum dalam buku "*Surveys or Economically Active Population, Employment, Unemployment and Underemployment*" An ILO Manual Concepts and Methods, ILO 1992. Tujuannya adalah agar data ketenagakerjaan yang dihasilkan dari berbagai survei di Indonesia dapat dibandingkan secara internasional, tanpa mengesampingkan kondisi ketenagakerjaan spesifik Indonesia.

Pendekatan teori ketenagakerjaan yang digunakan dalam Sakernas adalah Konsep Dasar Angkatan Kerja (*Standard Labor Force Concepts*) yang dapat dilihat pada bagan ketenagakerjaan di bawah ini.

Gambar 1. Diagram Ketenagakerjaan



The *Labour Force Concept*, Yang Disarankan oleh *International Labour Organization* (ILO)

Perlu juga dipahami beberapa konsep umum yang digunakan dalam Sakernas yang juga diadopsi untuk penyusunan KILM, meliputi konsep dan definisi mengenai penduduk, usia kerja, periode referensi dan kriteria satu jam.

**Penduduk** adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi berniat menetap. Berdasarkan bagan ketenagakerjaan, penduduk dibagi menjadi dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Selanjutnya usia kerja dibedakan pula menjadi dua kelompok berdasarkan kegiatan utama yang sedang dilakukannya. Kelompok tersebut adalah Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja.

**Usia kerja** adalah batas umur yang ditetapkan untuk pengelompokan penduduk yang aktif secara ekonomi. Indonesia dalam memberikan batasan umur pada penduduk usia kerja, menggunakan batas bawah usia kerja (*economically active population*) 15 tahun (meskipun dalam survei Sakernas dikumpulkan informasi mulai dari penduduk usia 10 tahun) dan tanpa batas atas usia kerja. Pemberian batas bawah dan batas atas bervariasi dari setiap negara sesuai dengan kebutuhan dan situasi. Sebagai contoh penggunaan batas bawah: Mesir (6 tahun), Brazil (10 tahun), Swedia, USA (16 tahun), Canada (14 dan 15 tahun), India (5 dan 15 Tahun), dan Venezuela (10 dan 15 tahun), sementara penggunaan batas atas penduduk usia kerja contohnya: Denmark, Swedia, Norwegia, Finlandia (74 tahun), Mesir, Malaysia, Mexico (65 tahun), banyak negara termasuk Indonesia tidak menggunakan batas atas.

**Angkatan kerja**, dikelompokkan lagi menjadi dua, yaitu penduduk yang bekerja dan pengangguran. Sedangkan **bukan angkatan kerja** terdiri dari penduduk yang pada periode rujukan tidak mempunyai /melakukan aktivitas ekonomi. Diantaranya dirinci menjadi tiga kelompok besar kegiatan, yaitu penduduk yang sedang sekolah, penduduk yang sedang mengurus rumah tangga, dan penduduk yang sedang melakukan kegiatan lainnya (olahraga, kursus, piknik, dan kegiatan sosial seperti berorganisasi dan kerja bakti).

**Bekerja** adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan tidak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

Penghasilan atau keuntungan mencakup upah/gaji/pendapatan termasuk semua tunjangan dan bonus bagi pekerja/karyawan/pegawai dan hasil usaha berupa sewa, bunga atau keuntungan, baik berupa uang atau barang bagi pengusaha. Kegiatan bekerja mencakup baik yang sedang bekerja maupun yang punya pekerjaan tetapi dalam seminggu yang lalu sementara tidak aktif bekerja karena sakit, cuti, menunggu panen, mogok kerja, tugas belajar dan sejenisnya.

Pengangguran meliputi mereka yang sedang mencari kerja, atau mempersiapkan usaha, atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa), atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Mencari kerja di sini adalah upaya yang dilakukan untuk memperoleh pekerjaan pada suatu periode rujukan. Mempersiapkan usaha baru adalah kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha baru yang bertujuan memperoleh penghasilan/keuntungan atas resiko sendiri, baik dengan atau tanpa mempekerjakan buruh/ karyawan/pegawai dibayar maupun tak dibayar. Mempersiapkan suatu usaha yang dimaksud adalah jika ada 'tindakan nyata' seperti mengumpulkan modal atau perlengkapan/alat, mencari lokasi/tempat, mengurus surat ijin usaha dan sebagainya, telah/sedang dilakukan. Merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa) adalah alasan bagi mereka yang berkali-kali mencari pekerjaan tetapi tidak berhasil mendapatkan pekerjaan sehingga merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Atau mereka yang merasa karena keadaan situasi/kondisi/iklim/ musim menyebabkan tidak mungkin mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Sudah diterima bekerja, tetapi belum mulai bekerja adalah alasan bagi mereka yang tidak mencari kerja/mempersiapkan usaha karena sudah diterima bekerja, namun pada saat pencacahan belum mulai bekerja.

Periode referensi merupakan periode waktu ditetapkan untuk membatasi keterangan responden. Dalam survei rumah tangga atau individu, periode referensi yang pendek (*a short recent reference period*) akan meminimumkan kesalahan responden dalam mengingat (*recall*) dan juga mengurangi masalah (statistik) yang timbul oleh karena perpindahan penduduk dan perubahan status aktivitas, pekerjaan dan karakteristik penduduk lainnya. Standar internasional untuk periode referensi yang pendek adalah satu hari atau satu minggu. Periode referensi satu minggu (yang lalu) paling banyak diterapkan di negara-negara yang melaksanakan survei angkatan kerja nasional, termasuk Indonesia.

Periode referensi lainnya yang digunakan dalam Sakernas adalah kriteria satu jam. Kriteria ini digunakan dengan pertimbangan untuk mencakup semua jenis pekerjaan yang mungkin ada pada suatu negara, termasuk di dalamnya adalah pekerjaan dengan waktu singkat (*short time work*), pekerja bebas, *stand-by work* dan pekerjaan yang tidak beraturan lainnya. Kriteria satu jam juga dikaitkan dengan definisi bekerja dan penganggur yang digunakan, di mana penganggur adalah situasi dari ketiadaan pekerjaan secara total (*lack of work*) dari jumlah jam kerja dinaikkan maka akan mengubah definisi penganggur yaitu bukan lagi ketiadaan pekerjaan secara total.

Di samping itu, juga untuk memastikan bahwa pada suatu tingkat agregasi tertentu input tenaga kerja total berkaitan langsung dengan produksi total. Hal ini diperlukan terutama ketika dilakukan analisis gabungan antara statistik ketenagakerjaan dan statistik produksi.

ILO merekomendasikan untuk memperhatikan *the one hour criterion*, yaitu digunakannya konsep/definisi satu jam dalam periode referensi tertentu untuk menentukan seseorang dikategorikan sebagai bekerja (*employed*). BPS menggunakan konsep/definisi "bekerja paling sedikit 1 jam dalam seminggu yang lalu" untuk mengkategorikan seseorang (*currently economically active population*) sebagai bekerja, tanpa melihat lapangan usaha, jabatan, maupun status pekerjaannya.

## 2.2 INDIKATOR KUNCI PASAR TENAGA KERJA

ILO meluncurkan Indikator Pasar Tenaga Kerja / KILM (*Key Indicator of Labor Market*) pada tahun 1999 untuk melengkapi program reguler pengumpulan data dan untuk meningkatkan penyebaran data pada elemen kunci dari pasar tenaga kerja dunia.

Terdapat 20 (dua puluh) indikator yang disusun oleh ILO yang dikelompokkan ke dalam 8 (delapan) kelompok, yaitu:

- 1) Partisipasi di dunia kerja, yang terdiri dari KILM 1, yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja;
- 2) Indikator pekerja, terdiri dari KILM 2 (rasio pekerja terhadap jumlah penduduk), KILM 3 (penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan utama), KILM 4 (lapangan usaha tenaga kerja), KILM 5 (pekerja paruh waktu), KILM 6 (jam kerja) dan KILM 7 (tenaga kerja di ekonomi formal);
- 3) Indikator pengangguran, *underemployment* dan ketidak-aktifan, yang terdiri dari KILM 8 (pengangguran), KILM 9 (pengangguran pada kelompok muda), KILM 10 (pengangguran jangka panjang), KILM 11 (pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan), KILM 12 (*underemployment*), dan KILM 13 (tingkat ketidakaktifan);
- 4) Indikator pendidikan dan melek huruf, yang terdiri dari KILM 14 (pencapaian pendidikan dan melek huruf);
- 5) Indikator upah dan biaya tenaga kerja, yang terdiri dari KILM 15 (indeks upah sektor manufaktur), KILM 16 (indikator upah dan pendapatan berdasarkan jabatan) dan KILM 17 (upah per jam);
- 6) Produktifitas tenaga kerja yang terdiri dari KILM 18 (produktifitas tenaga kerja);
- 7) Indikator elastisitas tenaga kerja yang termuat dalam KILM 19 (elastisitas tenaga kerja); dan
- 8) Indikator kemiskinan, pekerja miskin dan distribusi pendapatan yang tertuang dalam KILM 20 (indikator kemiskinan, pekerja miskin dan distribusi pendapatan).

## 2.2.1. PARTISIPASI DI DUNIA KERJA

### KILM 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK adalah ukuran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat aktif di pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan, yang memberikan indikasi ukuran relatif dari pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk terlibat dalam produksi barang dan jasa. Rincian angkatan kerja menurut jenis kelamin dan kelompok umur memberikan profil distribusi penduduk yang aktif secara ekonomi. Secara umum, kegunaan indikator ini adalah untuk mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah dan menunjukkan besaran relatif dan pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk produksi barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Table publikasi standar yang dikeluarkan ILO (*KILM 6<sup>th</sup> ed*) menyajikan estimasi tingkat partisipasi angkatan kerja menurut jenis kelamin dan kelompok umur, dengan standar sebagai berikut: 15+, 15-24, 15-64, 25-54, 25-34, 35-54, 55-64, dan 65 tahun ke atas. Penggunaan kelompok umur ini digunakan di lebih dari 190 negara selama tahun 1980 sampai saat ini.

Beberapa konsep yang berkaitan dengan indikator ini adalah sebagai berikut:

#### Angkatan Kerja (AK)

Konsep angkatan kerja merujuk pada kegiatan utama yang dilakukan oleh penduduk usia kerja selama periode tertentu. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan penganggur.

Dalam angkatan kerja terdapat penduduk yang kegiatannya adalah bekerja. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan paling sedikit 1 (satu) jam secara tidak terputus selama seminggu yang lalu. Kegiatan bekerja ini mencakup, baik yang sedang bekerja maupun yang punya pekerjaan tetapi dalam seminggu yang lalu sementara tidak bekerja, misalnya karena cuti, sakit, dan sejenisnya. Konsep bekerja satu jam selama seminggu yang lalu juga digunakan oleh banyak negara antara lain Pakistan, Filipina, Bulgaria, Hungaria, Polandia, Romania, Federasi Rusia, dan lainnya.

#### Bukan Angkatan Kerja (BAK)

Penduduk usia kerja yang tidak termasuk angkatan kerja mencakup penduduk yang bersekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya.

## 2.2.2. INDIKATOR PEKERJA

### KILM 2. Rasio Pekerja Terhadap Jumlah Penduduk/ Employment to Population Ratio (EPR)

Rasio pekerja terhadap jumlah penduduk (EPR) didefinisikan sebagai proporsi penduduk usia kerja suatu negara yang berstatus bekerja terhadap penduduk usia kerja. Rasio yang tinggi berarti

sebagian besar penduduk suatu negara adalah bekerja, sementara rasio rendah berarti bahwa sebagian besar penduduk tidak terlibat langsung dalam kegiatan yang berhubungan dengan pasar, karena mereka menganggur atau (lebih mungkin) tidak termasuk dalam angkatan kerja yang sering disebut sebagai Bukan Angkatan Kerja (BAK).

Rasio ini memberikan informasi tentang kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja, karena di banyak negara indikator ini menghasilkan analisis yang lebih mendalam dibandingkan dengan tingkat pengangguran. Meskipun secara keseluruhan rasio tinggi biasanya dianggap sebagai positif, indikator ini saja tidak cukup untuk menilai tingkat pekerjaan yang layak atau tingkat defisit pekerjaan yang layak. Indikator tambahan diperlukan untuk menilai isu-isu seperti upah/gaji, jam kerja, lapangan kerja sektor informal, setengah pengangguran dan kondisi kerja. Bahkan, nilai rasio ini bisa tinggi untuk alasan yang tidak selalu positif misalnya pilihan pendidikan yang terbatas sehingga kaum muda mengambil pekerjaan yang tersedia daripada tinggal di sekolah untuk membangun modal manusia mereka (memilih bekerja demi melanjutkan sekolah/ membiayai sekolah). Untuk alasan ini, sangat disarankan bahwa indikator ini harus ditinjau ulang secara kolektif dalam setiap evaluasi kebijakan tenaga kerja di suatu negara/wilayah.

### **KILM 3. Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama**

Kategorisasi menurut status pekerjaan dapat membantu dalam memahami dinamika pasar tenaga kerja dan tingkat pembangunan suatu negara. Selama bertahun-tahun, dan dengan kemajuan pembangunan, suatu negara biasanya akan mengharapkan untuk dapat melihat pergeseran pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa, dengan peningkatan pada jumlah pekerja yang digaji (buruh/karyawan/pegawai) dan penurunan jumlah pekerja keluarga yang sebelumnya berkontribusi/bekerja di sektor pertanian.

Status pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan. Informasi mengenai status dalam pekerjaan yang dikumpulkan dalam Sakernas adalah:

1. Berusaha sendiri.
2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar.
3. Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar.
4. Buruh/Karyawan/Pegawai.
5. Pekerja bebas di pertanian.
6. Pekerja bebas di nonpertanian.
7. Pekerja keluarga/tak dibayar.

Dalam publikasi ini, pengelompokan status dalam pekerjaan utama adalah sebagai berikut:

Penduduk yang bekerja dengan upah/gaji adalah penduduk bekerja dengan status pekerjaan buruh/karyawan/pegawai;

Penduduk yang berusaha, terdiri dari:

Pengusaha, yaitu penduduk bekerja dengan status pekerjaan dibantu buruh tetap/buruh dibayar;

Berusaha sendiri dan berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar;

Pekerja bebas yang terdiri dari pekerja bebas di pertanian dan non-pertanian;

Pekerja keluarga atau pekerja tak dibayar.

#### **KILM 4. Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor**

Informasi sektoral biasanya berguna untuk mengidentifikasi pergeseran yang besar dalam ketenagakerjaan dan tingkat pembangunan. Dalam buku teks pembangunan ekonomi, tenaga kerja berpindah dari pertanian dan aktifitas tenaga kerja intensif lainnya ke sektor industri dan akhirnya menuju ke sektor jasa-jasa; dalam prosesnya, pekerja berpindah dari desa ke kota.

Klasifikasi baku yang digunakan dalam penggolongan lapangan pekerjaan/ lapangan usaha adalah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. Untuk kepentingan penyajian/publikasi, digunakan kategori/sektor sebagai berikut:

Pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan;

Pertambangan dan penggalian;

Industri pengolahan;

Listrik, gas dan air;

Bangunan;

Perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel;

Angkutan, pergudangan dan komunikasi;

Keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan;

Jasa kemasyarakatan.

Untuk kepentingan analisis, sektor dalam perekonomian dibagi menjadi 3 (tiga) sektor yaitu *A(griculture)*/Pertanian, *M(anufacture)*/Manufaktur dan *S(ervices)*/Jasa-jasa, berdasarkan pada definisi sektor *International Standard Industrial Classification* (ISIC) System (Revisi 2 dan Revisi 3).

#### **KILM 5. Pekerja Paruh Waktu**

Jumlah jam kerja berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan pekerja serta pada tingkat produktivitas dan biaya tenaga kerja yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Mengukur tingkat dan tren di jam-jam bekerja di masyarakat, untuk berbagai kelompok pekerja dan untuk pekerja secara individu menjadi penting ketika melakukan pemantauan kerja dan kondisi hidup maupun ketika

menganalisis perkembangan ekonomi. Indikator pekerja paruh waktu berfokus pada individu dengan jumlah jam kerja kurang dari *full time*, yang merupakan proporsi dari total pekerja. Karena tidak ada definisi yang disepakati secara internasional untuk jumlah minimum jam dalam seminggu yang merupakan pekerjaan penuh-waktu (*full time*), garis pemisah tersebut ditentukan, baik atas dasar negara-oleh-negara atau melalui penggunaan estimasi khusus. Tetapi, jika tidak ada kesepakatan, biasanya digunakan batas 35 jam seminggu sebagai jam kerja normal. Beberapa negara yang menggunakan batas 35 jam adalah Republik Korea, Amerika dan El Salvador. Untuk kasus Indonesia, batas yang digunakan adalah kurang dari 35 jam seminggu dan mencari pekerjaan.

### **KILM 7. Tenaga Kerja Sektor Informal**

Pekerja di sektor informal terkait perkiraan jumlah orang yang bekerja di sektor informal dibandingkan dengan jumlah orang bekerja. Dalam hal ukuran dan pertumbuhan, sektor informal merupakan bagian penting dari kehidupan ekonomi, sosial dan politik di sebagian besar negara berkembang, serta beberapa negara maju. Di negara-negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk atau urbanisasi yang tinggi, ekonomi informal cenderung tumbuh untuk menyerap sebagian besar tenaga kerja. Konferensi Internasional Statistik Perburuhan (ICLS) ke-15 mendefinisikan sektor informal sebagai unit produksi dalam usaha rumahtangga yang dimiliki oleh rumah tangga. Mereka yang bekerja di sektor informal terdiri semua orang yang, selama periode acuan tertentu, yang bekerja di setidaknya satu unit produksi yang memenuhi konsep sektor informal, terlepas dari status mereka dalam pekerjaan dan apakah itu pekerjaan utama atau pekerjaan sekunder. Resolusi ICLS memperbolehkan beberapa variasi konsep nasional. Akibatnya, informasi untuk indikator sering didasarkan pada definisi nasional dan pengukuran ekonomi informal.

BPS melakukan pendekatan khusus dalam menentukan pekerja sektor formal/ informal yaitu berdasarkan status dalam pekerjaan utama dari jenis pekerjaan/jabatan.

### **2.2.3. INDIKATOR PENGANGGURAN, UNDER-EMPLOYMENT DAN KETIDAKAKTIFAN**

#### **KILM 8. Pengangguran**

Tingkat pengangguran menggambarkan proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif mencari dan bersedia untuk bekerja. Ini tidak boleh disalahartikan sebagai kesulitan ekonomi, meskipun korelasi antara tingkat pengangguran dan kemiskinan sering ada dan cenderung memiliki korelasi negatif. Definisi baku untuk penganggur adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, dan bersedia untuk bekerja. Secara spesifik, penganggur terbuka dalam Sakernas, terdiri atas:

Mereka yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan;

Mereka yang tidak bekerja dan mempersiapkan usaha;

Mereka yang tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan

Mereka yang tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.

Tingkat pengangguran oleh banyak negara digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan. Jika bekerja diambil sebagai situasi yang diinginkan bagi orang-orang dalam populasi yang secara ekonomi aktif (angkatan kerja), maka pengangguran menjadi situasi yang tidak diinginkan. Namun, beberapa pengangguran jangka pendek dapat diinginkan dan diperlukan untuk memastikan penyesuaian (*adjustment*) terhadap fluktuasi ekonomi. Tingkat pengangguran pada kelompok tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan usia, jenis kelamin, dan pendidikan berguna dalam mengidentifikasi kelompok pekerja dan sektor-sektor yang paling rentan terhadap pengangguran.

Sementara tingkat pengangguran tenaga kerja, dapat dianggap sebagai indikator yang paling informatif mencerminkan indikasi pasar umum dan kinerja pasar tenaga kerja dan ekonomi secara keseluruhan, tidak harus ditafsirkan sebagai ukuran kesulitan ekonomi atau kesejahteraan. Bila didasarkan pada standar internasional yang direkomendasikan, tingkat pengangguran hanya memberikan gambaran proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan tapi bersedia dan secara aktif mencari pekerjaan. Angka ini menggambarkan tentang sumber daya ekonomi pekerja menganggur atau anggota keluarga mereka. Penggunaannya harus dibatasi sebagai ukuran pemanfaatan tenaga kerja serta indikasi kegagalan untuk mencari pekerjaan. Tindakan-tindakan lain, termasuk indikator pendapatan yang terkait, akan diperlukan untuk mengevaluasi kesulitan ekonomi.

Tingkat pengangguran secara matematis didefinisikan sebagai hasil bagi yang dihasilkan dari membagi jumlah pengangguran (untuk negara atau kelompok pekerja tertentu) dengan jumlah angkatan kerja. Harus ditekankan bahwa denominator/ faktor pembagi yang berfungsi sebagai dasar statistik ini adalah tenaga kerja atau penduduk yang aktif secara ekonomi, bukan jumlah penduduk. Perbedaan ini tidak selalu dipahami oleh publik. Memang istilah “angkatan kerja” dan “bekerja” kadang-kadang keliru digunakan secara bergantian. Misalnya, tingkat pengangguran adalah 6 persen, maka dapat dikatakan bahwa terdapat 6 persen dari penduduk yang aktif secara ekonomi (angkatan kerja) saat ini sedang tidak bekerja dan mencari pekerjaan atau bersedia bekerja.

#### **KILM 9. Pengangguran Pada Kelompok Pemuda**

Tingkat pengangguran penduduk umur muda memberikan gambaran kepada kita mengenai proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif mencari dan bersedia untuk bekerja. Pemuda yang menganggur merupakan salah satu masalah yang memerlukan penanganan kebijakan khusus yang penting bagi banyak negara, terlepas dari tahap pembangunan. Untuk tujuan

indikator ini, istilah “pemuda” mencakup orang yang berusia 16 sampai 30 tahun, sedangkan “orang dewasa” didefinisikan sebagai orang yang berusia 31 tahun ke atas.

#### **KILM 10. Pengangguran Jangka Panjang**

Pengangguran jangka panjang merupakan stok tenaga kerja yang tidak dapat dimanfaatkan, merupakan bagian dari angkatan kerja, tetapi tidak memiliki pekerjaan (menganggur) dalam jangka waktu tertentu. Sayangnya, Sakernas tidak mengumpulkan informasi mengenai berapa lama seseorang menganggur. Indikator ini tidak dapat disajikan karena keterbatasan variabel yang dikumpulkan dalam Sakernas.

#### **KILM 11. Pengangguran Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Indikator ini melihat hubungan antara pencapaian pendidikan pekerja dan pengangguran yang memberikan gambaran mengenai perubahan dalam permintaan tenaga kerja. Informasi mengenai tingkat pengangguran berdasarkan pendidikan memiliki implikasi penting bagi penduduk bekerja dan kebijakan pendidikan. Jika dikonfirmasi bahwa orang dengan tingkat pendidikan yang rendah berada pada resiko yang lebih tinggi menjadi pengangguran, reaksi politik yang mungkin adalah meningkatkan tingkat pendidikan mereka atau menciptakan lebih banyak pekerjaan dengan keterampilan yang lebih rendah (*low skilled job*) di dalam negeri. Di sisi lain, komposisi pengangguran yang lebih tinggi di kalangan orang-orang dengan pendidikan tinggi bisa menunjukkan kurangnya pekerjaan teknis yang profesional dan tingkat tinggi. Tabel yang biasanya disajikan menunjukkan distribusi persentase dari total pengangguran suatu negara sesuai dengan lima tingkat sekolah, tingkat pra-dasar, kurang dari satu tahun, tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tersier (dalam publikasi ini hanya dikategorikan dalam empat tingkat sekolah). Sebagai catatan, angka yang ditampilkan bisa berupa distribusi dan bisa berupa *rate*.

#### **KILM 12. Setengah Penganggur (*Underemployment*)**

Mereka yang dikategorikan dalam setengah penganggur adalah mereka yang jumlah jam kerjanya di bawah ambang batas jam kerja normal (bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu yang lalu), dengan kondisi: Mereka yang dengan sukarela mencari pekerjaan tambahan yang meliputi: Mereka yang menginginkan pekerjaan lain untuk menambah jam kerjanya dari pekerjaannya yang sekarang; Mereka yang menginginkan mendapat ganti dari pekerjaannya yang sekarang dengan pekerjaan lain yang mempunyai jam kerja lebih banyak; Mereka yang bersedia menerima pekerjaan tambahan.

### **KILM 13. Tingkat Ketidakaktifan**

Tingkat ketidakaktifan adalah ukuran proporsi penduduk usia kerja suatu negara yang tidak terlibat aktif dalam pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan. Tingkat ketidakaktifan yang merupakan proporsi penduduk usia kerja yang tidak termasuk dalam angkatan kerja, jika dijumlahkan dengan tingkat partisipasi angkatan kerja (lihat KILM 1) maka hasilnya adalah 100 persen, dengan perkataan lain tingkat ketidakaktifan sama dengan 1 dikurang TPAK (1-TPAK).

Dalam beberapa situasi, tingkat ketidakaktifan tinggi untuk kelompok populasi tertentu tidak harus selalu dilihat sebagai “buruk”, misalnya, tingkat ketidakaktifan yang relatif tinggi untuk wanita usia 25-34 tahun mungkin karena mereka meninggalkan pasar kerja untuk mengurus keluarga dan melaksanakan tanggung jawab seperti melahirkan anak dan pengasuhan anak. Dengan menggunakan data dalam KILM 13, pengguna dapat melihat sejauh mana ibu berkaitan dengan pola tenaga kerja perempuan. Telah lama diakui bahwa aspek-aspek struktur rumah tangga terkait dengan aktivitas pasar tenaga kerja. Misalnya, perempuan kepala rumah tangga cenderung memiliki tingkat aktivitas yang relatif tinggi. Pada pasangan yang menikah, suami biasanya memiliki tingkat ketidakaktifan yang rendah, terutama jika ada anak-anak dalam keluarga. Tingkat ketidakaktifan yang rendah pada wanita bisa berkorelasi dengan tingginya tingkat ketidakaktifan untuk laki-laki, yaitu suami, jika laki-laki sedang menyelesaikan pendidikan atau secara fisik tidak mampu bekerja, sehingga membuat istri sebagai pencari nafkah utama.

### **2.2.4. INDIKATOR PENDIDIKAN DAN MELEK HURUF**

#### **KILM 14. Pencapaian Pendidikan dan Melek Huruf**

Informasi tentang tingkat pencapaian pendidikan saat ini adalah indikator terbaik yang tersedia untuk melihat tingkat keahlian tenaga kerja. Pendidikan merupakan salah satu faktor penentu penting untuk menilai kemampuan suatu negara untuk bersaing dengan sukses di pasar dunia dan membuat efisiensi penggunaan kemajuan teknologi yang cepat. Tabel KILM 14 menyajikan informasi mengenai tingkat pendidikan angkatan kerja dengan lima tingkat pendidikan yaitu tidak pernah bersekolah, tingkat pra-dasar, tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tinggi (dalam publikasi ini hanya dikategorikan dalam empat tingkat pendidikan yaitu tidak pernah bersekolah, tingkat dasar, tingkat menengah dan tingkat tinggi).

Kategori yang digunakan dalam indikator ini secara konseptual berdasarkan tingkat Standar Internasional Klasifikasi Pendidikan (ISCED-97). Pengelompokan tingkat pendidikan berdasarkan ISCED-97 adalah sebagai berikut:

- Tidak pernah bersekolah adalah mereka yang tidak/belum pernah bersekolah sama sekali;
- Sekolah dasar, yaitu mereka yang memiliki pendidikan tidak/belum tamat SD, SD/ Ibtidaiyah, Paket A, SMP/Tsanawiyah, SMP Kejuruan dan Paket B;

Sekolah menengah, yaitu mereka dengan pendidikan SMA/Aliyah, SMK, Paket C; dan Sekolah tinggi, yaitu mereka yang memiliki ijazah Diploma I/II, Diploma III, Diploma IV/Sarjana dan S2/S3.

## **2.2.5. INDIKATOR UPAH DAN BIAYA TENAGA KERJA**

### **KILM 15. Indeks Upah Sektor Manufaktur**

Sektor manufaktur yang dikenal sebagai sektor formal dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kesejahteraan pekerja melalui indeks upah pada sektor ini. Tetapi, terdapat survei khusus (Survey Upah dan Survey Struktur Upah) yang bukan merupakan bagian dari Sakernas yang dilakukan untuk mengumpulkan data terkait dengan indikator ini. Oleh karena itu indikator tersebut tidak dapat disajikan pada publikasi KILM ini.

### **KILM 16. Indikator Upah dan Pendapatan**

Berdasarkan Jabatan Salah satu keterbatasan variabel pada Sakernas adalah hanya menanyakan upah/pendapatan pada status pekerjaan tertentu. Akibatnya, tidak semua penduduk bekerja mempunyai informasi pendapatan/upah. Estimasi pendapatan dapat saja dilakukan dengan menggunakan teknik statistik (*Two Step Heckmen*). Oleh karena itu, indikator ini juga tidak dapat disajikan pada publikasi ini.

### **KILM 17. Upah Per Jam**

Seperti KILM 15 dan 16 mengenai informasi upah, Sakernas tidak memiliki informasi upah per jam. Tidak adanya pertanyaan mengenai informasi upah per jam dikarenakan kebanyakan di Indonesia, pekerja tidak dibayar berdasarkan jam kerja, tetapi hari kerja. Hanya sedikit sekali lapangan pekerjaan yang membayar pekerja berdasarkan hitungan jam. Selain itu, dalam Sakernas, yang ditanyakan adalah pendapatan sebulan terakhir, sementara untuk jam kerja, ditanyakan jumlah jam kerja seminggu terakhir. Estimasi upah kerja per jam akan sangat beresiko menimbulkan bias statistik. Oleh karena itu, indikator ini tidak dipublikasikan pada publikasi KILM ini.

## **2.2.6. PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA**

### **KILM 18. Produktifitas Tenaga Kerja**

Tingkat produktifitas tenaga kerja merupakan ukuran penting untuk melihat sejauh mana faktor produksi L (Labor/Tenaga Kerja) berperan dalam proses produksi. Tingkat produktifitas tenaga kerja memberikan gambaran mengenai output yang dihasilkan oleh satu unit tenaga kerja. Semakin tinggi output yang dihasilkan, maka semakin produktif tenaga kerja tersebut, demikian sebaliknya. Indikator ini juga penting untuk melihat sektor mana saja yang memiliki tenaga kerja dengan produktifitas tinggi, dan sektor mana yang tidak. Identifikasi ini memberikan gambaran sektor yang

memerlukan tenaga kerja yang banyak (*labour intencive*) dan sektor padat modal (*capital intencive*). Tetapi, keterbatasan variabel yang dikumpulkan pada Sakernas mengakibatkan tidak bisanya indikator ini disajikan pada publikasi kali ini.

### **2.2.7. INDIKATOR ELASTISITAS TENAGA KERJA**

#### **KILM 19. Elastisitas Tenaga Kerja**

Tingkat elastisitas tenaga kerja memberikan gambaran mengenai banyaknya tenaga kerja yang terserap pada proses produksi untuk menghasilkan nilai tambah tertentu. Dengan kata lain, elastisitas tenaga kerja adalah banyaknya tenaga kerja terserap setiap peningkatan satu persen pertumbuhan ekonomi. Untuk melakukan analisis ini, diperlukan data nilai tambah (PDB/PDRB). Analisis ini merupakan analisis lintas sektor, sehingga tidak bisa ditampilkan dalam publikasi ini.

### **2.2.8. INDIKATOR KEMISKINAN, PEKERJA MISKIN DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN**

#### **KILM 20. Indikator Kemiskinan, Pekerja Miskin dan Distribusi Pendapatan**

Sebagaimana indikator elastisitas tenaga kerja, indikator kemiskinan, pekerja miskin dan distribusi pendapatan juga memerlukan beberapa variabel tambahan yang tidak ditanyakan pada Sakernas. Selain itu, data lintas sektor juga penting untuk melengkapi analisis ini. Indikator ini tidak dapat disajikan karena keterbatasan variabel yang dikumpulkan dalam Sakernas

*Halaman Kosong*

<https://papua.bps.go.id>

## BAB 3

### INDIKATOR PASAR TENAGA KERJA

#### 3.1 PARTISIPASI DI DUNIA KERJA (KILM 1)

##### KILM 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK adalah ukuran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat aktif di pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan, yang memberikan indikasi ukuran relatif dari pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk terlibat dalam produksi barang dan jasa. Informasi angkatan kerja menurut jenis kelamin dan kelompok umur memberikan gambaran distribusi penduduk yang aktif secara ekonomi.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian. TPAK dihitung dengan menyatakan jumlah orang dalam angkatan kerja sebagai persentase dari penduduk usia kerja. Angkatan kerja adalah jumlah orang yang bekerja ditambah jumlah pengangguran. Penduduk usia kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang ditentukan untuk mengukur karakteristik ekonomi.

Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas pada Agustus 2019 yang masuk dalam angkatan kerja ada sebanyak 1.842.203 jiwa, meningkat jika dibandingkan Agustus 2018. Pada periode yang sama, TPAK menurun dari 79,11 persen pada Agustus 2018 menjadi 76,92 persen pada Agustus 2019. Penurunan TPAK terjadi karena peningkatan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang lebih besar daripada peningkatan jumlah penduduk yang termasuk angkatan kerja.

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin dan klasifikasi daerah, TPAK laki-laki menurun dari 86,39 persen pada Agustus 2018 menjadi 86,00 persen pada Agustus 2019. Hal yang sama terjadi dengan TPAK perempuan yang menurun dari 70,80 persen pada Agustus 2018 menjadi 66,70 persen pada Agustus 2019. Dilihat dari klasifikasi wilayahnya, baik di perkotaan maupun perdesaan, TPAK Agustus 2019 juga mengalami penurunan dibanding Agustus 2018. Di wilayah perkotaan, TPAK menurun sekitar 0,47 persen. Sementara ini, di wilayah perdesaan, TPAK mengalami penurunan lebih banyak yaitu sekitar 2,86 persen.

**Tabel 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Sakernas Tahun 2017 - 2019**

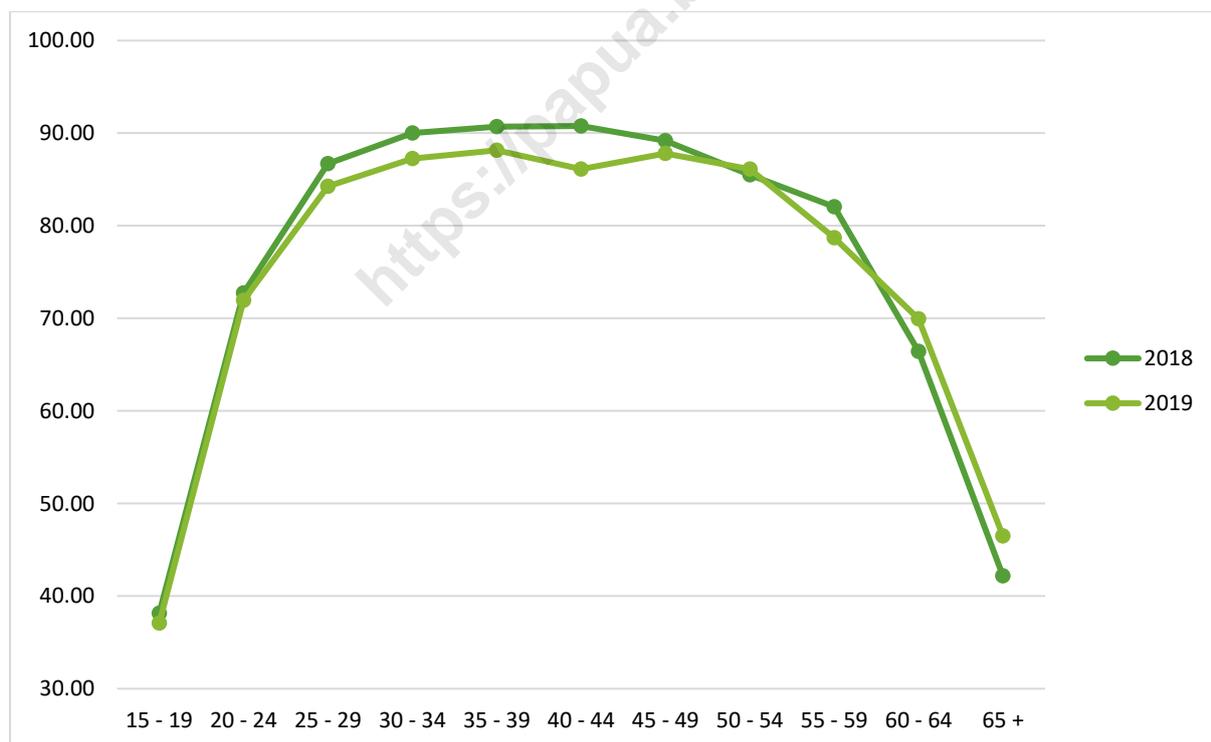
Kategori	2017	2018	2019
<b>TOTAL</b>	<b>76,94</b>	<b>79,11</b>	<b>76,92</b>
LAKI-LAKI	85,28	86,39	86,00
PEREMPUAN	67,45	70,80	66,70
PERKOTAAN	62,23	65,34	64,87
PERDESAAN	82,89	84,85	81,99
<b>(15-64)</b>	<b>77,79</b>	<b>79,95</b>	<b>77,69</b>
LAKI-LAKI	86,27	87,28	86,98
PEREMPUAN	68,17	71,63	67,28
PERKOTAAN	63,59	66,74	66,16
PERDESAAN	83,44	85,36	82,45
<b>(15-24)</b>	<b>54,53</b>	<b>55,29</b>	<b>54,24</b>
LAKI-LAKI	58,59	59,85	58,74
PEREMPUAN	49,74	49,90	49,10
PERKOTAAN	34,60	37,72	38,98
PERDESAAN	63,02	63,22	60,80
<b>(25-54)</b>	<b>86,63</b>	<b>89,03</b>	<b>84,33</b>
LAKI-LAKI	96,86	97,69	94,72
PEREMPUAN	75,39	79,54	85,34
PERKOTAAN	75,96	78,63	77,18
PERDESAAN	90,62	93,00	90,25
<b>(25-34)</b>	<b>85,77</b>	<b>88,33</b>	<b>85,70</b>
LAKI-LAKI	96,11	97,03	96,78
PEREMPUAN	75,39	78,99	73,97
PERKOTAAN	73,98	77,91	76,97
PERDESAAN	90,22	92,56	89,23
<b>(35-54)</b>	<b>87,21</b>	<b>89,48</b>	<b>77,65</b>
LAKI-LAKI	97,34	98,12	98,41
PEREMPUAN	75,39	79,90	74,68
PERKOTAAN	77,32	79,13	77,32
PERDESAAN	90,89	93,28	90,92
<b>(55-64)</b>	<b>70,76</b>	<b>76,38</b>	<b>75,53</b>
LAKI-LAKI	81,11	84,08	85,79
PEREMPUAN	56,47	65,50	61,52
PERKOTAAN	54,13	63,94	63,86
PERDESAAN	80,12	83,24	82,10
<b>65 Tahun ke atas</b>	<b>38,75</b>	<b>42,18</b>	<b>46,50</b>
LAKI-LAKI	44,06	50,57	50,79
PEREMPUAN	31,56	30,77	40,45
PERKOTAAN	22,42	26,99	31,25
PERDESAAN	51,50	55,29	58,82

Sumber: Sakernas 2017-2019

Dapat dilihat pada Tabel 1, bahwa di semua pengelompokan di rentang umur produktif (15-64 tahun), TPAK mengalami penurunan. Penurunan terbesar dapat terlihat pada rentang umur 35-54 tahun, dari yang semula 89,48 persen pada Agustus 2018 menjadi 77,65 persen pada tahun ini. Sementara itu, peningkatan TPAK terjadi pada kelompok usia 65 tahun ke atas yang naik sebesar 4,32 persen.

Gambar 2 menunjukkan pola TPAK menurut kelompok umur. Dapat dilihat pada grafik bahwa pola yang ditunjukkan pada Agustus 2019 hampir serupa dengan tahun sebelumnya. TPAK masih sangat rendah pada kelompok umur 15-19 tahun, di mana sebagian besar penduduk kemungkinan masih menjalani masa pendidikan. TPAK mulai naik secara signifikan pada kelompok umur 20-24 tahun. Ini mengindikasikan bahwa sudah banyak kaum muda yang masuk ke dalam pasar kerja. Kemudian, pada umur 30 sampai 49 tahun, TPAK stabil pada persentase yang tinggi. Sedikit berbeda dengan tahun 2018 di mana TPAK mencapai puncaknya pada kelompok umur 40-44 tahun, pada tahun 2019 persentase tertinggi terjadi pada kelompok umur 35-39 tahun. Tingkat partisipasi kembali menurun signifikan pada kelompok umur 60 tahun ke atas.

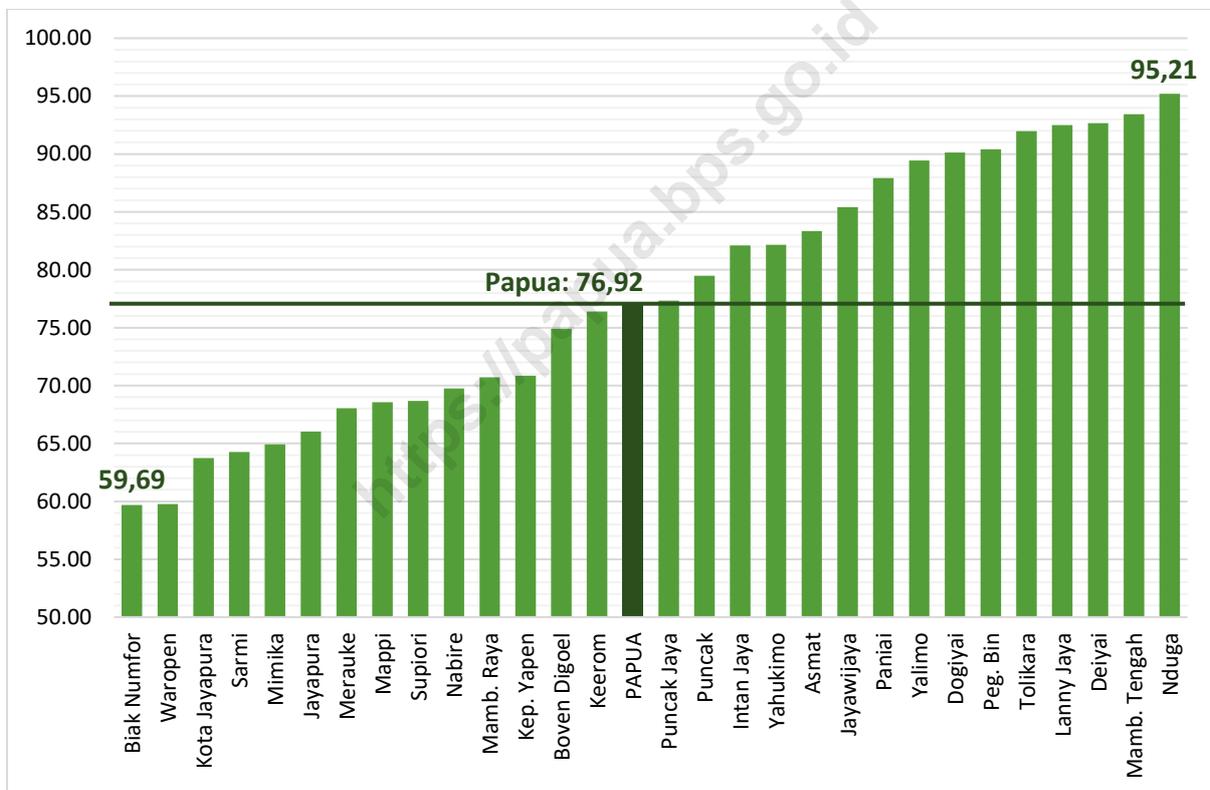
**Gambar 2. Pola TPAK Menurut Kelompok Umur, 2018-2019**



Sumber: Sakernas 2018-2019, data diolah

Gambar 3 menunjukkan pergerakan TPAK yang terjadi di kabupaten/kota di Provinsi Papua pada Agustus 2019. Sebuah garis horizontal di tengah grafik adalah TPAK Provinsi Papua. Dengan garis tersebut, dapat lebih mudah dilihat kabupaten/kota yang memiliki TPAK lebih besar atau lebih kecil dari angka provinsi. Untuk lebih memudahkan pengamatan, tingkat partisipasi diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbar. Setelah diurutkan, tampak bahwa pada kondisi Agustus 2019 TPAK tertinggi terjadi di Kabupaten Nduga. Sementara itu, TPAK terendah terjadi di Kabupaten Biak Numfor. Disparitas yang terjadi antara TPAK tertinggi terhadap terendah sekitar 35,52 persen. Selanjutnya, dengan mengacu pada TPAK Provinsi Papua sebagai rata-rata, maka terdapat 14 kabupaten/kota yang memiliki TPAK berada dibawah rata-rata Provinsi Papua. Sebaliknya, 15 kabupaten lainnya memiliki TPAK lebih tinggi.

**Gambar 3. TPAK Menurut Kabupaten/Kota, 2019**



Sumber: Sakernas 2019, data diolah

### 3.2. INDIKATOR PEKERJA

#### KILM 2. Rasio Pekerja Terhadap Jumlah Penduduk/ Employment to Population Ratio (EPR)

Rasio pekerja terhadap jumlah penduduk (EPR) didefinisikan sebagai proporsi penduduk usia kerja suatu negara yang berstatus bekerja terhadap penduduk usia kerja. Rasio yang tinggi berarti sebagian besar penduduk suatu negara adalah bekerja, sementara rasio rendah berarti bahwa sebagian besar penduduk tidak terlibat langsung dalam kegiatan yang berhubungan dengan pasar, karena mereka menganggur atau (lebih mungkin) tidak termasuk dalam angkatan kerja yang sering disebut sebagai Bukan Angkatan Kerja (BAK).

Rasio ini memberikan informasi tentang kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja, karena di banyak negara indikator ini menghasilkan analisis yang lebih mendalam dibandingkan dengan tingkat pengangguran. Meskipun secara keseluruhan rasio tinggi biasanya dianggap sebagai positif, indikator ini saja tidak cukup untuk menilai tingkat pekerjaan yang layak atau tingkat defisit pekerjaan yang layak. Indikator tambahan diperlukan untuk menilai isu-isu seperti upah/gaji, jam kerja, lapangan kerja sektor informal, setengah pengangguran dan kondisi kerja. Bahkan, nilai rasio ini bisa tinggi untuk alasan yang tidak selalu positif misalnya pilihan pendidikan yang terbatas sehingga kaum muda mengambil pekerjaan yang tersedia daripada tinggal di sekolah untuk membangun modal manusia mereka (memilih bekerja demi melanjutkan sekolah/ membiayai sekolah). Untuk alasan ini, sangat disarankan bahwa indikator ini harus ditinjau ulang secara kolektif dalam setiap evaluasi kebijakan tenaga kerja di suatu wilayah.

Pada periode Agustus 2018 ke Agustus 2019, nilai EPR Provinsi Papua menurun sekitar 2,46 persen dari 76,58 menjadi 74,12 pada tahun 2019. Hal ini menjelaskan bahwa telah terjadi penurunan persentase penduduk yang bekerja pada periode Agustus 2018 hingga Agustus 2019 dengan cukup signifikan. EPR Papua sebesar 74,21 persen pada tahun 2019 mempunyai arti bahwa dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas, terdapat sekitar 74-75 orang yang bekerja pada Agustus 2019. Apabila dilihat menurut jenis kelamin, pada Penduduk Usia Kerja (15 tahun ke atas) terjadi penurunan EPR baik pada penduduk laki-laki maupun perempuan. Penurunan EPR pada perempuan (4,50 persen) lebih besar dibanding pada laki-laki (0,56 persen). Sementara itu, jika dipisahkan menurut wilayah tempat tinggal, penurunan terjadi baik pada wilayah perkotaan maupun perdesasaan. Penurunan EPR di perdesasaan yang (3,11 persen) lebih besar daripada perkotaan (0,78 persen).

**Tabel 2. Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Kelompok Umur, 2017-2019**

Kelompok Umur	2017	2018	2019
<b>Usia 15 tahun ke atas</b>	<b>2.291.111</b>	<b>2.320.862</b>	<b>2.394.887</b>
Laki-laki	1.166.792	1.236.571	1.268.591
Perempuan	1.022.438	1.084.291	1.126.296
Perkotaan	614.640	683.284	709.246
Perdesaan	1.574.590	1.637.578	1.685.641
<b>Umur muda (15-24)</b>	<b>543.178</b>	<b>549.132</b>	<b>580.095</b>
Laki-laki	293.802	297.593	309.242
Perempuan	249.376	251.539	270.853
Perkotaan	162.254	170.758	174.267
Perdesaan	380.924	378.374	405.828
<b>Umur dewasa (25+)</b>	<b>1.747.933</b>	<b>1.771.730</b>	<b>1.814.792</b>
Laki-laki	925.876	938.978	959.349
Perempuan	822.057	832.752	855.443
Perkotaan	497.185	512.526	534.979
Perdesaan	1.250.748	1.259.204	1.279.813
<b>Umur 15 tahun ke atas yang bekerja</b>	<b>1.680.093</b>	<b>1.777.207</b>	<b>1.775.030</b>
Laki-laki	986.892	1.031.299	1.050.919
Perempuan	693.201	745.908	724.111
Perkotaan	368.434	409.002	419.017
Perdesaan	1.311.659	1.368.205	1.356.013
<b>Umur muda (15-24) yang bekerja</b>	<b>260.373</b>	<b>272.279</b>	<b>282.721</b>
Laki-laki	148.324	157.573	161.045
Perempuan	112.049	114.706	121.676
Perkotaan	36.371	46.142	50.611
Perdesaan	224.002	226.137	232.110
<b>Umur dewasa (25+) yang bekerja</b>	<b>1.419.720</b>	<b>1.504.928</b>	<b>1.492.309</b>
Laki-laki	838.568	873.726	889.874
Perempuan	581.152	631.202	602.435
PerkotaanP	332.063	362.860	368.406
Perdesaan	1.087.657	1.142.068	1.123.903

Sumber: Sakernas 2017-2019, data diolah

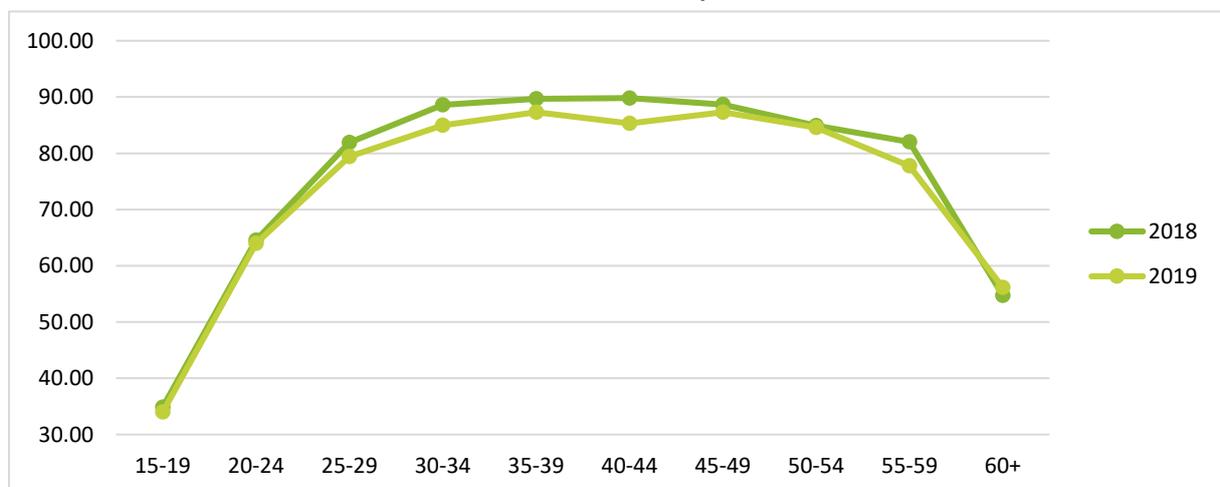
**Tabel 3. Rasio Penduduk Bekerja (EPR) terhadap Total Penduduk Usia Kerja, 2017-2019**

Kelompok Umur	2017	2018	2019
<b>EPR Penduduk 15 +</b>	<b>74.16</b>	<b>76,58</b>	<b>74,12</b>
Laki-laki	81.93	83,40	82,84
Perempuan	65.31	68,79	64,29
Perkotaan	56.61	59,86	59,08
Perdesaan	81.25	83,55	80,44
<b>EPR Penduduk Usia 15-24</b>	<b>47.94</b>	<b>49,58</b>	<b>48,74</b>
Laki-laki	50.48	52,95	52,08
Perempuan	44.93	45,60	44,92
Perkotaan	22.42	27,02	29,04
Perdesaan	58.80	59,77	57,19
<b>EPR Penduduk Usia 25 Tahun +</b>	<b>82.31</b>	<b>84,94</b>	<b>82,23</b>
Laki-laki	91.91	93,05	92,76
Perempuan	71.49	75,80	70,42
Perkotaan	67.77	70,80	68,86
Perdesaan	88.09	90,70	87,82

Sumber: Sakernas 2017-2019, data diolah

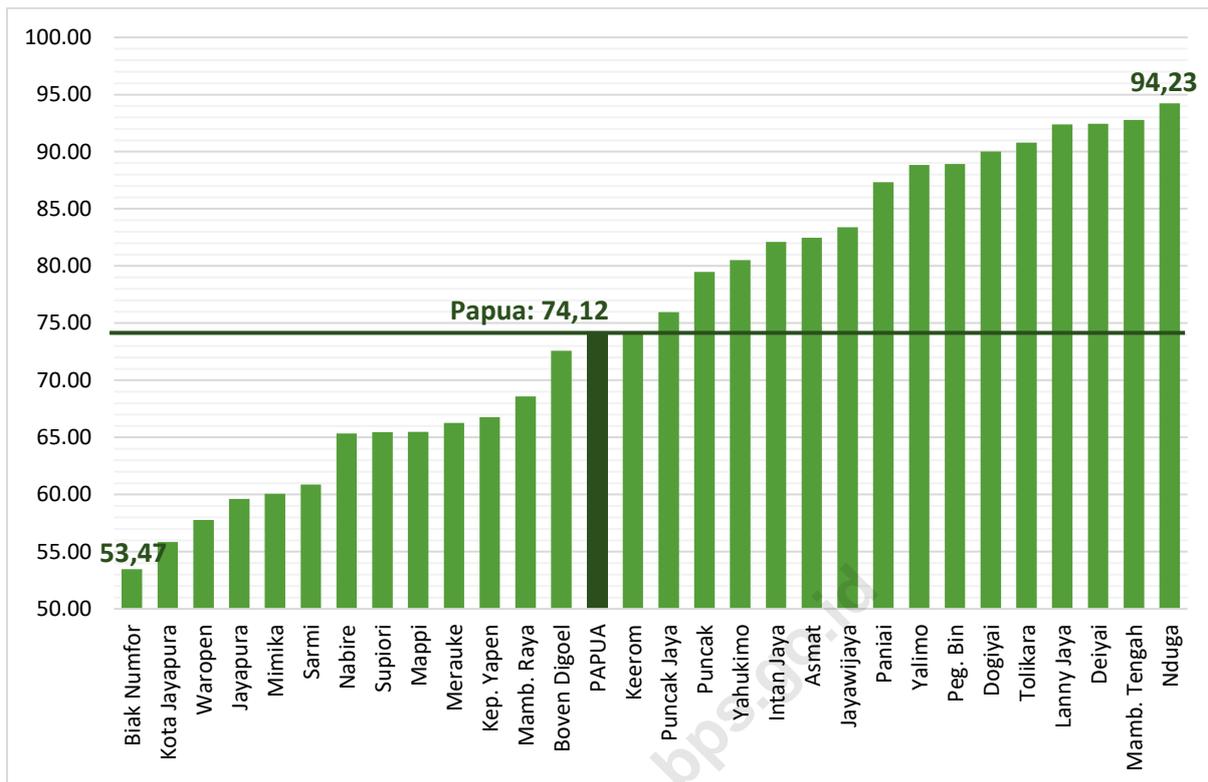
Jika EPR diklasifikasikan berdasarkan kelompok umur sebagaimana ditunjukkan di tabel 3, dapat dilihat bahwa pada Agustus 2019, EPR Penduduk Dewasa (25 tahun ke atas) sebesar 82,23 persen jauh lebih besar dibandingkan EPR Penduduk Usia Muda (15-24 tahun) yang hanya sebesar 48,74 persen. Selisih yang jauh ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk usia muda tidak terlibat dalam pasar kerja tetapi masuk dalam kelompok bukan angkatan kerja karena bersekolah.

**Gambar 4. Pola EPR menurut Kelompok Umur, 2018-2019**



Sumber: Sakernas 2018-2019, data diolah

Gambar 5. Pola EPR Kabupaten/Kota, Agustus 2019



Sumber: Sakernas 2019, data diolah

Jika diamati menurut kabupaten/kota, terlihat pada Gambar 5 bahwa pada Agustus 2019, Biak Numfor menjadi kabupaten dengan EPR terendah, sedangkan kabupaten dengan EPR tertinggi adalah Kabupaten Nduga. Terdapat 13 kabupaten/kota dengan EPR di bawah angka Provinsi Papua (74,12). Rendahnya rasio penduduk bekerja terhadap jumlah penduduk usia kerja adalah karena persentase penduduk pengangguran dan penduduk bukan angkatan kerja yang cukup tinggi.

### KILM 3. Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Kategorisasi penduduk bekerja menurut status pekerjaan dapat membantu dalam memahami dinamika pasar tenaga kerja dan tingkat pembangunan suatu negara. Selama bertahun-tahun, dan dengan kemajuan pembangunan, suatu negara biasanya akan mengharapkan untuk dapat melihat pergeseran pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa, dengan peningkatan pada jumlah pekerja yang digaji (buruh/ karyawan/pegawai) dan penurunan jumlah pekerja keluarga yang sebelumnya berkontribusi/bekerja di sektor pertanian.

**Tabel 4. Jumlah dan Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, 2018-2019**

INDIKATOR	2018		2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%
<b>TOTAL</b>	<b>1.777.207</b>	<b>100,00</b>	<b>1.775.030</b>	<b>100</b>
Penduduk bekerja dengan upah/gaji (buruh/karyawan/pegawai)	375.896	21,15	365.892	20,61
Berusaha	823.155	46,32	871.785	49,11
Pengusaha	21.646	1,22	13.648	0,77
Berusaha sendiri+berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar	785.838	44,22	838.234	47,22
Pekerja bebas	15.671	0,88	19.903	1,12
Pekerja keluarga	578.156	32,53	537.353	30,27
Pekerja rentan	1.379.665	77,63	1.395.490	78,62
<b>Laki-laki</b>	<b>1.031.299</b>	<b>100,00</b>	<b>1.050.919</b>	<b>100</b>
Penduduk bekerja dengan upah/gaji (buruh/karyawan/pegawai)	275.134	26,68	269.978	25,69
Berusaha	635.155	61,59	676.569	64,38
Pengusaha	18.716	1,81	11.900	1,13
Berusaha sendiri+berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar	603.298	58,50	647.795	61,64
Pekerja bebas	13.141	1,27	16.874	1,61
Pekerja keluarga	121.010	11,73	104.372	9,93
Pekerja rentan	737.449	71,51	769.041	73,18
<b>Perempuan</b>	<b>745.908</b>	<b>100,00</b>	<b>724.111</b>	<b>100</b>
Penduduk bekerja dengan upah/gaji (buruh/karyawan/pegawai)	100.762	13,51	95.914	13,25
Berusaha	188.000	25,20	195.216	26,96
Pengusaha	2.930	0,39	1.748	0,24
Berusaha sendiri+berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar	182.540	24,47	190.439	26,30
Pekerja bebas	2.530	0,34	3.029	0,42
Pekerja keluarga	457.146	61,29	432.981	59,79
Pekerja rentan	642.216	86,10	626.449	86,51

Sumber: Sakernas 2018-2019, data diolah

Kategori status pekerjaan utama pada publikasi ini dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:

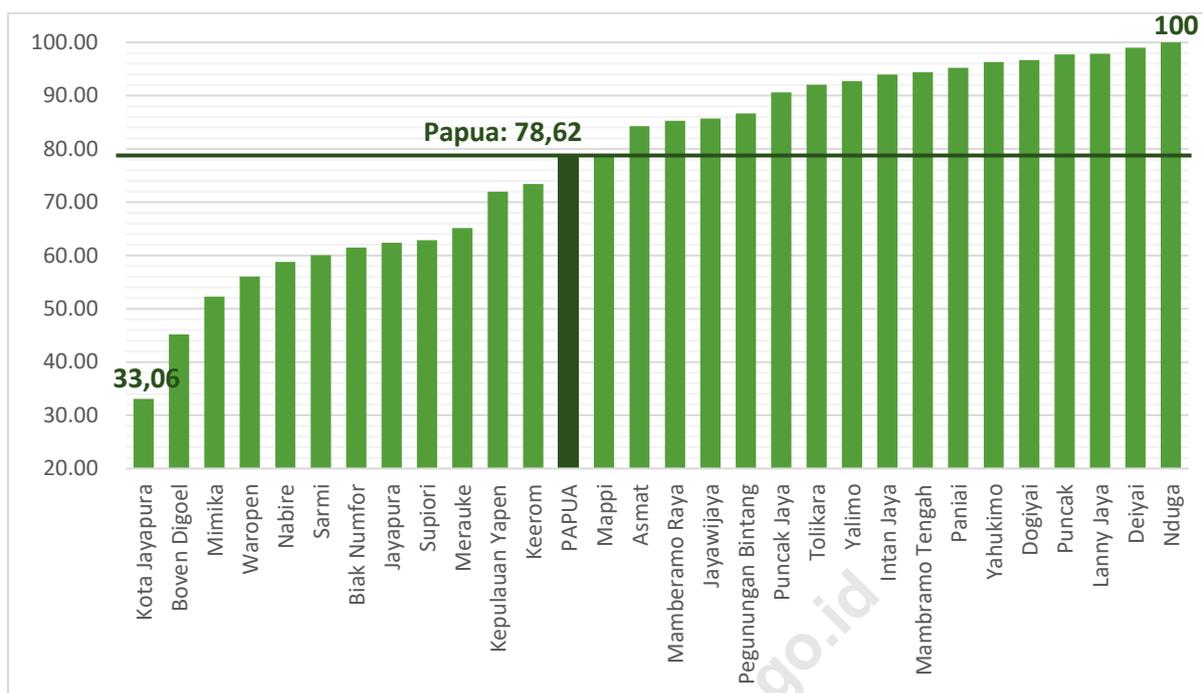
1. Pekerja dengan upah dan gaji
2. Pekerja yang berusaha/wiraswasta
3. Pekerja keluarga masing-masing yang dinyatakan sebagai proporsi dari total bekerja

Tabel 4 menunjukkan jumlah dan persentase penduduk bekerja menurut status pekerjaan utama. Pada Agustus 2019, dapat dilihat bahwa terjadi penurunan persentase pada penduduk yang berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai, pengusaha, dan pekerja keluarga. Sementara itu, penduduk yang berstatus berusaha sendiri dan yang tergolong sebagai pekerja rentan, meningkat secara persentase.

Dari sudut pandang gender, terlihat bahwa penduduk bekerja masih didominasi oleh laki-laki. Pada Agustus 2019, 1.050.919 orang penduduk bekerja berjenis kelamin laki-laki sedangkan perempuan berjumlah 724.111 orang. Tidak bisa dipungkiri jika pekerja rentan lebih didominasi oleh pekerja perempuan. Pada semua status pekerjaan utama, pekerja perempuan memiliki persentase yang lebih rendah dari pekerja laki-laki kecuali status sebagai pekerja keluarga yang membantu keluarganya untuk memperoleh penghasilan. Dalam hal ini, pekerja keluarga yang dimaksud adalah mereka yang membantu keluarga atau suami dalam mencari nafkah tanpa diberi upah, contohnya istri membantu suaminya berkebun, beternak, jualan di kios, dll.

Persentase pekerja rentan menurut kabupaten/kota dapat diamati pada gambar di bawah ini. Dengan mengurutkan persentase pekerja rentan dari terendah hingga yang tertinggi dapat lebih mudah untuk dianalisa. Dari grafik yang tersaji terlihat bahwa persentase pekerja rentan di sebagian besar kabupaten masih sangat tinggi. Kota Jayapura (33,06 persen) dan Kabupaten Boven Digoel (45,16 persen) merupakan dua kabupaten yang memiliki persentase pekerja rentan di bawah 50 persen. Sisanya, 27 kabupaten memiliki persentase pekerja rentan di atas 50 persen. Tingginya pekerja rentan di hampir semua kabupaten mengindikasikan masih rendahnya produktivitas, dan tingkat kesejahteraan penduduk. Hal ini ditengarai karena sebagian besar pekerja berpendidikan SD ke bawah, terserap di sektor pertanian dan dengan status bekerja sendiri, dibantu buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga.

**Gambar 6. Penduduk 15 Tahun Ke Atas Yang Termasuk Pekerja Rentan Menurut Kabupaten/Kota**



Sumber: Sakernas 2019, data diolah

#### **KILM 4, Penduduk yang Bekerja Menurut Sektor**

Informasi sektoral dapat digunakan untuk mengidentifikasi distribusi dan pergeseran yang besar dalam ketenagakerjaan dan tingkat pembangunan. Dalam buku teks pembangunan ekonomi, tenaga kerja cenderung berpindah dari pertanian dan aktifitas tenaga kerja intensif lainnya ke sektor industri dan akhirnya menuju ke sektor jasa-jasa. Dalam konteks ruang/spasial pekerja berpindah dari desa ke kota, Proses tersebut dapat dikatakan sebagai peralihan aktivitas ekonomi dari yang bersifat tradisional ke aktivitas ekonomi modern.

Untuk kepentingan analisis, aktivitas sektor dalam perekonomian dibagi menjadi 3 (tiga) sektor berdasarkan pada definisi sektor *International Standard Industrial Classification (ISIC) System* (Revisi 2 dan Revisi 3), yaitu:

1. *Agriculture*/Pertanian
2. *Manufacture*/Manufaktur
3. *Services*/Jasa-Jasa

**Tabel 5. Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, 2018-2019**

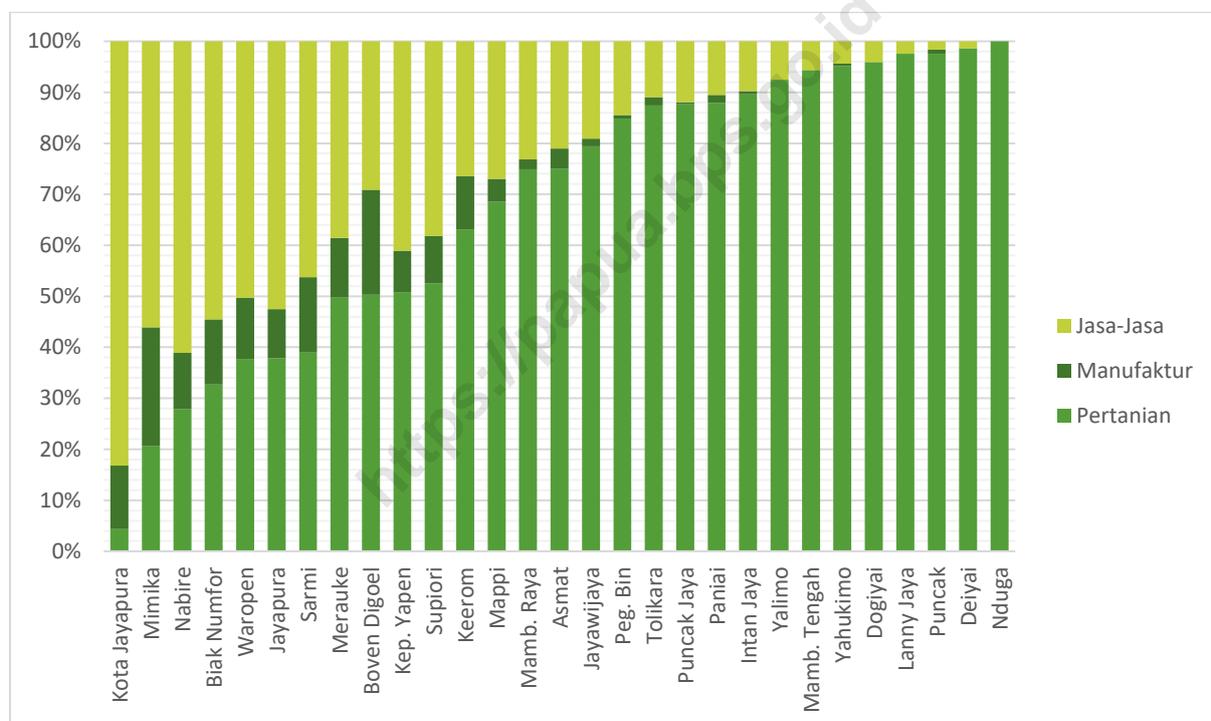
INDIKATOR	2018		2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%
<b>Pertanian</b>	<b>1.204.116</b>	<b>67,75</b>	<b>1.202.183</b>	<b>67,73</b>
<b>Manufaktur</b>	<b>95.842</b>	<b>5,39</b>	<b>102.392</b>	<b>5,77</b>
Pertambangan	16.226	0,91	16.382	0,92
Industri	31.077	1,75	34.417	1,94
Listrik, air, dan gas	3.214	0,18	3.652	0,21
Bangunan	45.325	2,55	47.941	2,70
<b>Jasa-Jasa</b>	<b>477.249</b>	<b>26,85</b>	<b>470.455</b>	<b>26,50</b>
Perdagangan	147.575	8,30	148.114	8,34
Transportasi	63.585	3,58	65.030	3,66
Keuangan	15.113	0,85	21.781	1,23
Jasa kemasyarakatan	250.976	14,12	235.530	13,27
<b>TOTAL</b>	<b>1.777.207</b>	<b>100,00</b>	<b>1.775.030</b>	<b>100,00</b>
<b>Pertanian</b>	<b>644.427</b>	<b>62,49</b>	<b>654.270</b>	<b>62,26</b>
<b>Manufaktur</b>	<b>82.760</b>	<b>8,02</b>	<b>89.227</b>	<b>8,49</b>
Pertambangan	14.761	1,43	15.574	1,48
Industri	21.479	2,08	23.743	2,26
Listrik, air, dan gas	2.914	0,28	3.652	0,35
Bangunan	43.606	4,23	46.258	4,40
<b>Jasa-Jasa</b>	<b>304.112</b>	<b>29,49</b>	<b>307.422</b>	<b>29,25</b>
Perdagangan	62.739	6,08	67.568	6,43
Transportasi	60.679	5,88	63.219	6,02
Keuangan	11.699	1,13	15.523	1,48
Jasa kemasyarakatan	168.995	16,39	161.112	15,33
<b>LAKI-LAKI</b>	<b>1.031.299</b>	<b>100,00</b>	<b>1.050.919</b>	<b>100,00</b>
<b>Pertanian</b>	<b>559.689</b>	<b>75,03</b>	<b>547.913</b>	<b>75,67</b>
<b>Manufaktur</b>	<b>13.082</b>	<b>1,75</b>	<b>13.165</b>	<b>1,82</b>
Pertambangan	1.465	0,20	808	0,11
Industri	9.598	1,29	10.674	1,47
Listrik, air, dan gas	300	0,04	0	0,00
Bangunan	1.719	0,23	1.683	0,23
<b>Jasa-Jasa</b>	<b>173.137</b>	<b>23,21</b>	<b>163.033</b>	<b>22,51</b>
Perdagangan	84.836	11,37	80.546	11,12
Transportasi	2.906	0,39	1.811	0,25
Keuangan	3.414	0,46	6.258	0,86
Jasa kemasyarakatan	81.981	10,99	74.418	10,28
<b>PEREMPUAN</b>	<b>745.908</b>	<b>100,00</b>	<b>724.111</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Sakernas 2018-2019, data diolah

Hasil Sakernas Agustus 2019 menunjukkan bahwa distribusi ketenagakerjaan di Provinsi Papua, masih didominasi sektor pertanian. Terbukti secara sektoral proporsi jumlah penduduk yang bekerja pada sektor ini mencapai 67,73 persen, kemudian disusul sektor jasa sebesar 26,50 persen. Persentase penduduk bekerja sektor pertanian ini menurun 0,02 pesen jika dibandingkan Agustus 2018 yang berada pada kisaran 67,75 persen. Sektor jasa juga mengalami penurunan sekitar 0,35 persen dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan terjadi pada sektor manufaktur yang sekarang berada di angka 5,77 persen dari semula 5,39 persen pada Agustus 2018.

Jika melihat sebarannya di kabupaten/kota pada Gambar 7, hal serupa dapat terlihat bahwa pada kondisi Agustus 2019 hampir di semua kabupaten/kota didominasi oleh pekerja di Sektor Pertanian dan Sektor Jasa. Pola yang sama juga ditemui di tahun sebelumnya.

**Gambar 7. Persentase Pekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Kabupaten/Kota, 2019**



Sumber: Sakernas 2019, data diolah

### KILM 5. Pekerja Paruh Waktu

Jumlah jam kerja berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan pekerja serta pada tingkat produktivitas dan biaya tenaga kerja yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Mengukur tingkat dan tren di jam-jam bekerja di masyarakat, untuk berbagai kelompok pekerja dan untuk pekerja secara individu menjadi penting ketika melakukan pemantauan kerja dan kondisi hidup maupun ketika menganalisis perkembangan ekonomi. Indikator pekerja paruh waktu berfokus pada individu dengan jumlah jam kerja kurang dari *full time*, yang merupakan proporsi dari total pekerja. Untuk kasus Indonesia, batas yang digunakan adalah bekerja kurang dari 35 jam seminggu.

**Tabel 6. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Penggunaan Waktu, 2018-2019**

INDIKATOR	2018	2019
<b>Jumlah Penduduk yang Bekerja</b>	<b>1.777.207</b>	<b>1.775.030</b>
Laki-laki	1.031.299	1.050.919
Perempuan	745.908	724.111
Perkotaan	409.002	419.017
Perdesaan	1.368.205	1.356.013
<b>Jumlah Pekerja Paruh Waktu</b>	<b>740.469</b>	<b>834.585</b>
Laki-laki	374.710	433.336
Perempuan	365.759	401.249
Perkotaan	72.638	94.332
Perdesaan	667.831	740.253
<b>Tingkat Pekerja Paruh Waktu (%)</b>	<b>41,66</b>	<b>47,02</b>
Laki-laki	36,33	41,23
Perempuan	49,04	55,41
Perkotaan	17,76	22,51
Perdesaan	48,81	54,59
<b>Share Perempuan pada Pekerja Paruh Waktu</b>	<b>49,40</b>	<b>48,08</b>

Sumber: Sakernas 2019, data diolah

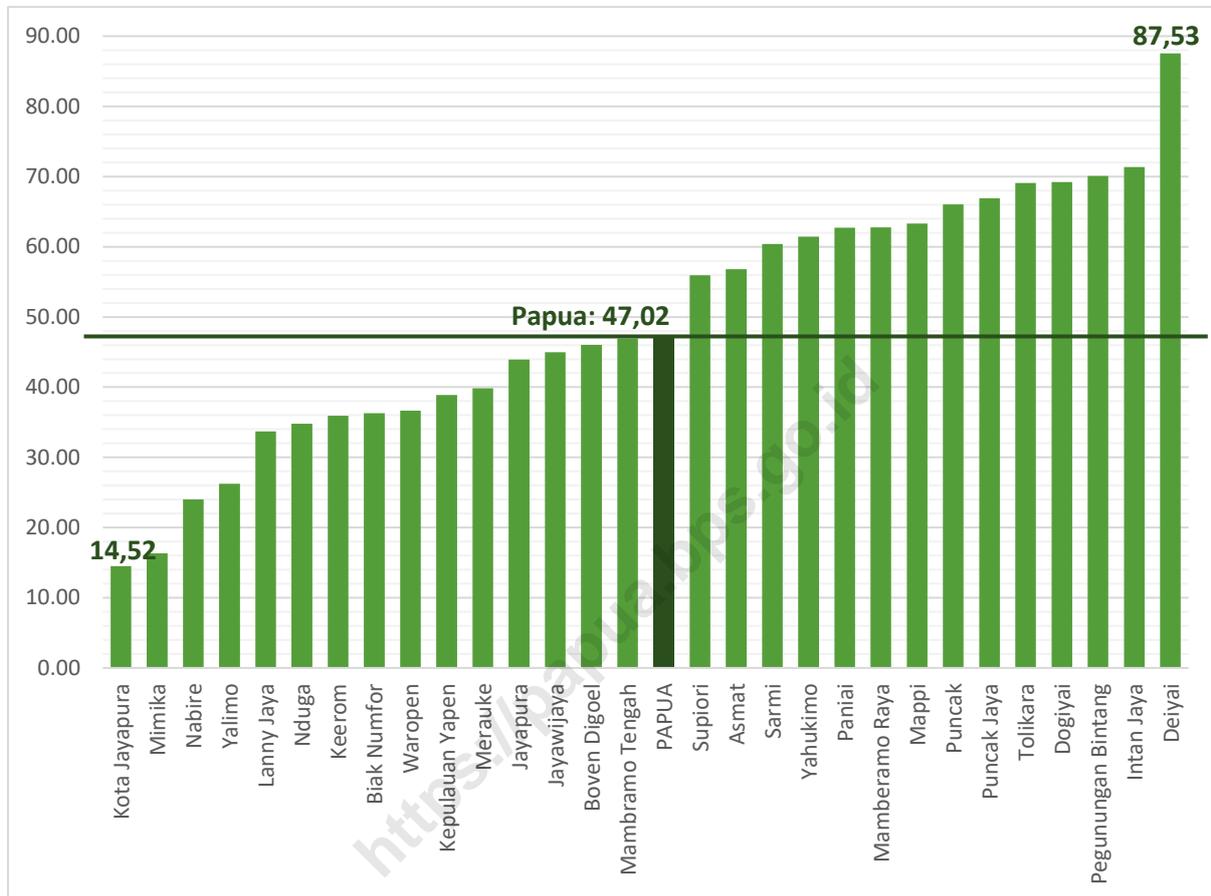
Pada Agustus 2019, tingkat pekerja paruh waktu mencapai 47,02 persen, meningkat 5,36 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Arti dari angka 47,02 persen tersebut yaitu dari 100 orang yang bekerja pada Agustus 2019, sekitar 47 orang diantaranya merupakan pekerja paruh waktu atau bekerja kurang dari 35 jam seminggu dan tidak sedang mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain. Sementara itu, *share* perempuan pada seluruh pekerja paruh waktu terlihat menurun. Dari sekitar 49,40 persen pada Agustus 2018 menjadi 48,08 pada tahun ini. Artinya adalah pada Agustus 2019, dari 100 orang pekerja paruh waktu, sekitar 48 diantaranya adalah perempuan.

Berdasarkan klasifikasi wilayah tempat tinggalnya, terlihat bahwa pada Agustus 2019, tingkat pekerja paruh waktu meningkat baik pada wilayah perkotaan maupun perdesaan. Tingkat pekerja paruh waktu di perdesaan jauh lebih tinggi daripada perkotaan, masing-masing yaitu 54,59 persen di perdesaan dan 22,51 persen di perkotaan.

Jika dilihat sebarannya menurut kabupaten/kota, pada tahun 2019 tingkat pekerja paruh waktu tertinggi berada di Kabupaten Deiyai yaitu sebesar 87,53 persen dan terendah berada di Kota

Jayapura yaitu sebesar 14,52 persen. Semakin rendahnya persentase pekerja paruh waktu di suatu kabupaten/kota, maka dapat diketahui bahwa produktivitas dan kesejahteraan penduduk yang bekerja semakin lebih baik.

**Gambar 8. Tingkat Pekerja Paruh Waktu menurut Kabupaten/Kota, 2018**



Sumber: Sakernas 2019, data diolah

### KILM 6. Jam Kerja

KILM ini bertujuan untuk menunjukkan jumlah orang yang bekerja menurut jam kerja (biasanya atau sebenarnya): kurang dari 25 jam kerja perminggu, antara 25 dan 34 jam, antara 35 dan 39 jam, antara 40-48 jam, antara 49-59 jam, 60 jam ke atas.

Hasil Sakernas Agustus 2019 menunjukkan bahwa lebih dari separuh penduduk bekerja di Provinsi Papua bekerja pada jam kerja normal (di atas 35 jam per minggu), yaitu sebanyak 916.644 orang atau sekitar 51,64 persen. Sementara sisanya, 48,36 persen bekerja di bawah jam kerja normal. Penduduk yang bekerja dengan jam kerja di atas 35 jam per minggu didominasi oleh penduduk laki-laki dan tinggal di wilayah perdesaan.

**Tabel 7. Penduduk Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja, Tahun 2019**

Indikator	Laki-laki	Perempuan	Total
a. 0 jam	15.471	8.330	23.801
b. 1-14 jam	49.678	60.913	110.591
c. 15-24 jam	146.119	167.924	314.043
d. 25-34 jam	237.539	172.412	409.951
e. 35-39 jam	198.884	129.243	328.127
f. 40-48 jam	253.219	137.662	390.881
g. 49-59 jam	70.103	19.735	89.838
h. 60 jam ke atas	79.906	27.892	107.798

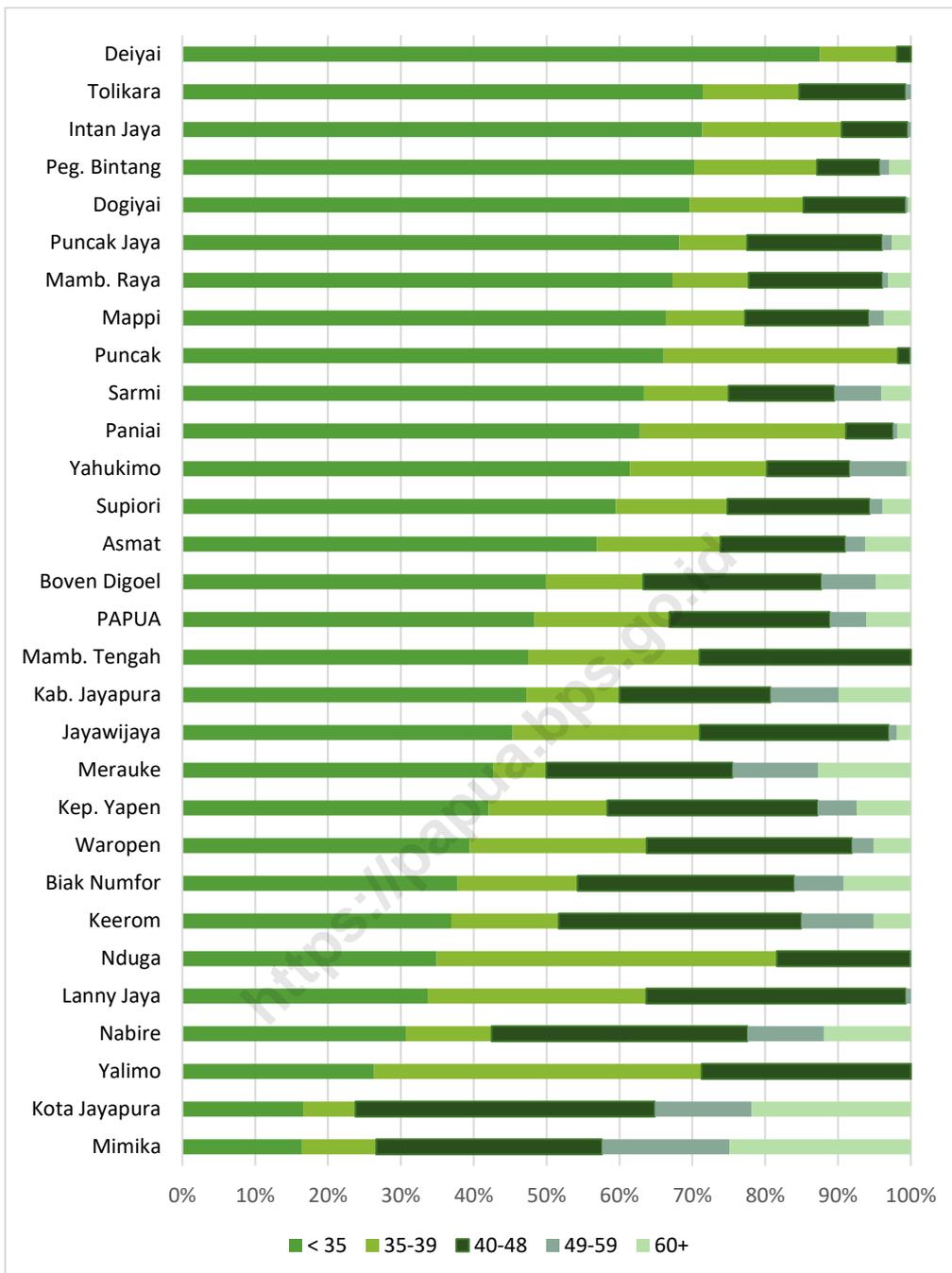
  

Indikator	Perkotaan	Perdesaan	Total
a. 0 jam	11.167	12.634	23.801
b. 1-14 jam	15.237	95.354	110.591
c. 15-24 jam	32.768	281.275	314.043
d. 25-34 jam	46.327	363.624	409.951
e. 35-39 jam	44086	284.041	328.127
f. 40-48 jam	139.175	251.706	390.881
g. 49-59 jam	47.967	41.871	89.838
h. 60 jam ke atas	82.290	25.508	107.798

Sumber: Sakernas 2019, data diolah

Pekerja laki-laki paling banyak bekerja dengan jumlah jam kerja 40-48 jam per minggu, sedangkan perempuan paling banyak bekerja pada kisaran jam kerja 25-34 jam per minggu. Sementara itu, dari segi wilayahnya, pekerja di perkotaan paling banyak bekerja di kisaran jam kerja 40-48 jam per minggu. Di wilayah perdesaan, pekerja paling banyak ada di jam kerja 25-34 jam per minggu. Dapat dilihat juga pada wilayah perkotaan, cukup banyak pekerja yang memiliki jumlah jam kerja 60 jam lebih per minggu. Hal ini menunjukkan tingginya produktivitas pekerja di wilayah perkotaan.

**Gambar 9. Persentase Pekerja Menurut Jumlah Jam Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2019**



Sumber: Sakernas 2019, data diolah

Jika diamati dari distribusi penduduk bekerja pada level kabupaten/kota pada Gambar 9, dapat diketahui bahwa Kabupaten Deiyai adalah kabupaten dengan persentase penduduk bekerja di bawah jam normal terbesar di Provinsi Papua dengan 87,53 persen. Disusul oleh Kabupaten Tolikara, Intan Jaya, dan Pegunungan Bintang yang memiliki persentase penduduk bekerja di bawah jam normal di atas 70 persen. Sementara itu, Kota Jayapura dan Kabupaten Mimika adalah dua kabupaten/kota yang memiliki persentase penduduk bekerja di bawah jam normal terendah di Provinsi Papua, masing-masing di bawah 20 persen.

## KILM 7. Tenaga Kerja Sektor Informal

Pekerja di sektor informal terkait perkiraan jumlah orang yang bekerja di sektor informal dibandingkan dengan jumlah orang bekerja. Dalam hal ukuran dan pertumbuhan, sektor informal merupakan bagian penting dari kehidupan ekonomi, sosial dan politik di sebagian besar negara berkembang, serta beberapa negara maju. Di negara-negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk atau urbanisasi yang tinggi, ekonomi informal cenderung tumbuh untuk menyerap sebagian besar tenaga kerja, Konferensi Internasional Statistik Perburuhan (ICLS) ke-15 mendefinisikan sektor informal sebagai unit produksi dalam usaha rumahtangga yang dimiliki oleh rumah tangga. Mereka yang bekerja di sektor informal terdiri semua orang yang, selama periode acuan tertentu, yang bekerja di setidaknya satu unit produksi yang memenuhi konsep sektor informal, terlepas dari status mereka dalam pekerjaan dan apakah itu pekerjaan utama atau pekerjaan sekunder, Resolusi ICLS memperbolehkan beberapa variasi konsep nasional. Akibatnya, informasi untuk indikator sering didasarkan pada definisi nasional dan pengukuran ekonomi informal, BPS melakukan pendekatan khusus dalam menentukan pekerja sektor formal/informal yaitu berdasarkan status dalam pekerjaan utama dari jenis pekerjaan/jabatan,

**Tabel 8. Jumlah dan Persentase Pekerja Menurut Sektor, 2018-2019**

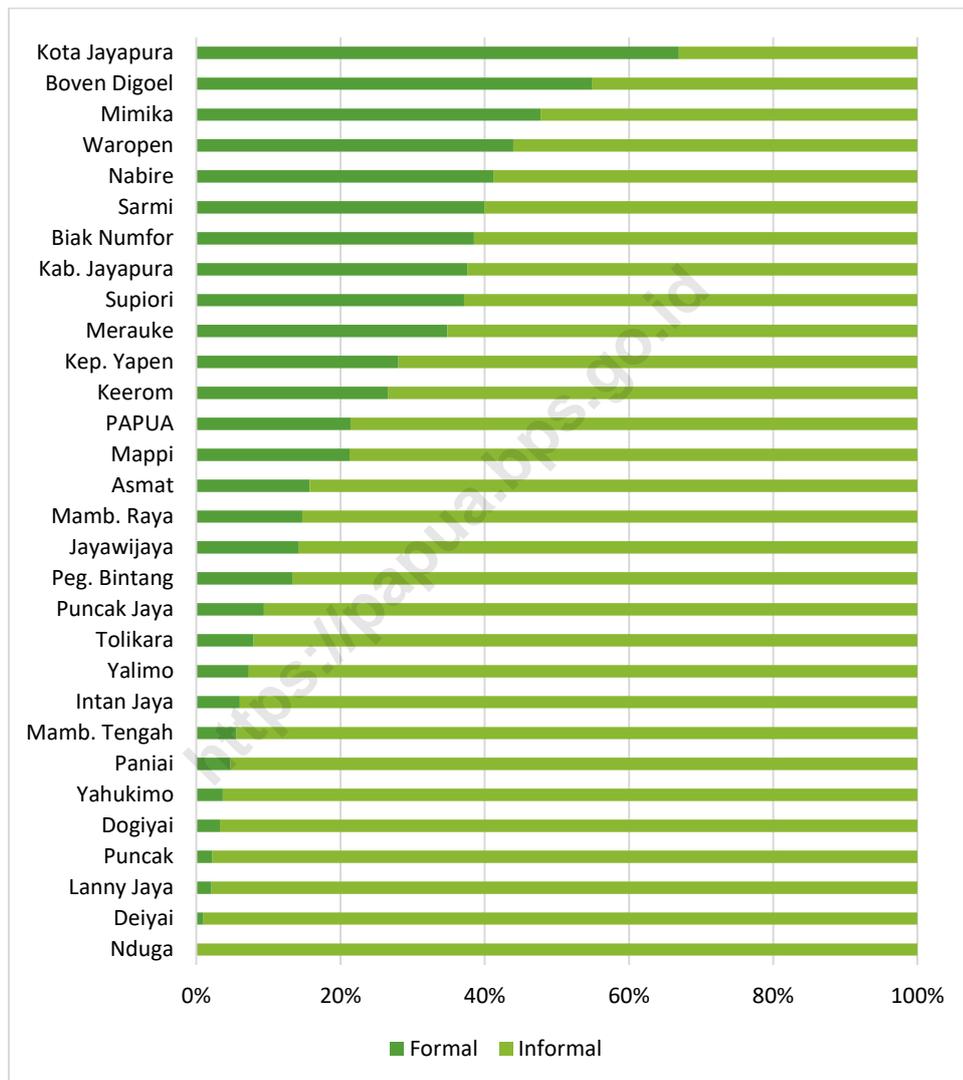
Indikator	2018	%	2019	%
<b>Penduduk 15+ yang bekerja</b>	<b>1.777.207</b>	<b>100,00</b>	<b>1775030</b>	<b>100,00</b>
Laki-laki	1.031.299	58,03	1050919	59,21
Perempuan	745.908	41,97	724111	40,79
Perkotaan	409.002	23,01	419017	23,61
Perdesaan	1.368.205	76,99	1356013	76,39
<b>Jumlah pekerja formal</b>	<b>397.542</b>	<b>22,37</b>	<b>379540</b>	<b>21,38</b>
Laki-laki	293.850	73,92	281878	74,27
Perempuan	103.692	26,08	97662	25,73
Perkotaan	237.320	59,70	234833	61,87
Perdesaan	160.222	40,30	144707	38,13
<b>Jumlah pekerja informal</b>	<b>1.379.665</b>	<b>77,63</b>	<b>1395490</b>	<b>78,62</b>
Laki-laki	737.449	53,45	769041	55,11
Perempuan	642.216	46,55	626449	44,89
Perkotaan	171.682	12,44	184184	13,20
Perdesaan	1.207.983	87,56	1211306	86,80

Sumber: Sakernas 2018-2019, data diolah

Pada Tabel 8 dapat dilihat sebaran pekerja di sektor formal dan informal yang diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin maupun wilayah tempat tinggal. Terlihat bahwa pada Agustus 2019, proporsi pekerja yang bekerja di sektor informal mencapai 78,62 persen sedangkan untuk sektor formal sekitar 21,38 persen. Jika dibandingkan dengan kondisi Agustus 2018, sektor informal

mengalami kenaikan sebesar 0,99 persen. Sebaliknya, sektor formal mengalami penurunan dengan persentase yang sama. Sektor formal didominasi oleh pekerja laki-laki dengan persentase 74,27 persen. Jika dilihat dari wilayahnya, pekerja sektor formal lebih banyak berada di wilayah perkotaan. Sementara itu, pada sektor informal, perbedaan *share* antara laki-laki dan perempuan tidak sebesar yang terjadi di sektor formal. Pada sektor ini, pekerja jauh lebih banyak berada di wilayah perdesaan.

**Gambar 10. Persentase Pekerja Menurut Sektor dan Kabupaten/Kota, 2019**



Sumber: Sakernas 2019, data diolah

Catatan: Mengacu pada penentuan pekerja sektoral menggunakan proxy II

Gambar 10 menampilkan sebaran pekerja sektor formal dan informal di masing-masing kabupaten/kota. Dapat dilihat bahwa pekerja di sektor informal mendominasi hampir di seluruh kabupaten di Provinsi Papua. Hanya Kota Jayapura dan Kabupaten Boven Digoel yang memiliki persentase pekerja sektor formal lebih besar dari sektor informal.

### 3.3. INDIKATOR PENGANGGURAN, *UNDEREMPLOYMENT* DAN KETIDAKAKTIFAN

#### KILM 8. Pengangguran

Tingkat pengangguran menggambarkan proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif mencari dan bersedia untuk bekerja. Ini tidak boleh disalahartikan sebagai kesulitan ekonomi, meskipun korelasi antara tingkat pengangguran dan kemiskinan sering ada dan cenderung memiliki korelasi negatif. Definisi baku untuk penganggur adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, dan bersedia untuk bekerja,

Tingkat pengangguran oleh banyak negara digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan. Jika bekerja diambil sebagai situasi yang diinginkan bagi orang-orang dalam populasi yang secara ekonomi aktif (angkatan kerja), maka pengangguran menjadi situasi yang tidak diinginkan. Namun, beberapa pengangguran jangka pendek dapat diinginkan dan diperlukan untuk memastikan penyesuaian (*adjustment*) terhadap fluktuasi ekonomi. Tingkat pengangguran pada kelompok tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan usia, jenis kelamin, dan pendidikan berguna dalam mengidentifikasi kelompok pekerja dan sektor-sektor yang paling rentan terhadap pengangguran,

Tingkat pengangguran dapat dianggap sebagai indikator Informatif yang paling mencerminkan kondisi pasar secara umum dan kinerja pasar tenaga kerja serta ekonomi secara keseluruhan. Tidak harus ditafsirkan sebagai ukuran kesulitan ekonomi atau kesejahteraan. Bila didasarkan pada standar internasional yang direkomendasikan, tingkat pengangguran hanya memberikan gambaran proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan tapi bersedia dan secara aktif mencari pekerjaan. Angka ini menggambarkan sumber daya ekonomi pekerja menganggur atau anggota keluarga mereka. Penggunaannya harus dibatasi sebagai ukuran pemanfaatan tenaga kerja serta indikasi kegagalan untuk mencari pekerjaan. Tindakan-tindakan lain, termasuk indikator pendapatan yang terkait, akan diperlukan untuk mengevaluasi kesulitan ekonomi,

Tingkat pengangguran secara matematis didefinisikan sebagai hasil bagi yang dihasilkan dari membagi jumlah pengangguran (untuk negara atau kelompok pekerja tertentu) dengan jumlah angkatan kerja. Harus ditekankan bahwa *denominator*/faktor pembagi yang berfungsi sebagai dasar statistik ini adalah tenaga kerja atau penduduk yang aktif secara ekonomi, bukan jumlah penduduk. Perbedaan ini tidak selalu dipahami oleh publik. Memang istilah “angkatan kerja” dan “bekerja” kadang-kadang keliru digunakan secara bergantian. Misalnya, tingkat pengangguran adalah 6 persen, maka dapat dikatakan bahwa terdapat 6 persen dari penduduk yang aktif secara ekonomi (angkatan kerja) yang saat ini sedang tidak bekerja dan mencari pekerjaan atau bersedia bekerja.

Tabel 9 menunjukkan bahwa pada Agustus 2019 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Papua meningkat sebesar 0,45 persen dibandingkan kondisi Agustus 2018. Sejalan dengan meningkatnya jumlah pengangguran, TPT Provinsi Papua pun mengalami peningkatan.

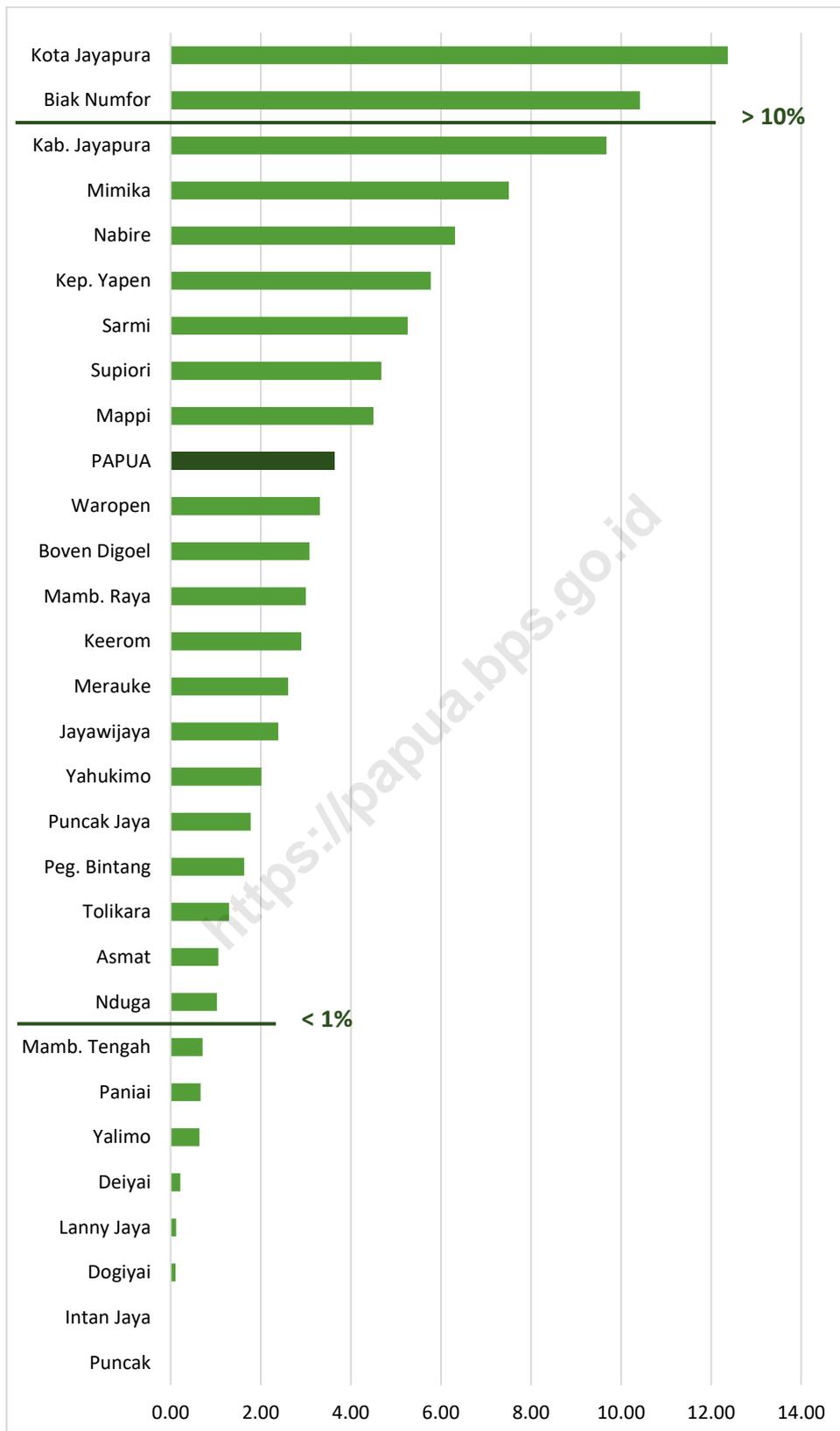
**Tabel 9. Indikator Pengangguran Papua, 2018-2019**

Indikator	2018	2019
<b>Jumlah Angkatan kerja</b>	1.835.963	1.842.203
Laki-laki	1.068.305	1.090.961
Perempuan	767.658	751.242
Perkotaan	446.455	460.066
Perdesaan	1.389.508	1.382.137
<b>Jumlah Pengangguran</b>	58.756	67.173
Laki-laki	37.006	40.042
Perempuan	21.750	27.131
Perkotaan	37.453	41.049
Perdesaan	21.303	26.124
<b>TPT</b>	3,20	3,65
Laki-laki	3,46	3,67
Perempuan	2,83	3,61
Perkotaan	8,39	8,92
Perdesaan	1,53	1,89

Sumber: Sakernas 2018-2019, data diolah

Besaran TPT tiap kabupaten/kota dapat dilihat pada Gambar 11. Grafik menunjukkan bahwa Kabupaten Puncak dan Kabupaten Intan Jaya menjadi kabupaten yang memiliki TPT terkecil di Provinsi Papua. Kabupaten-kabupaten lain yang memiliki TPT sangat kecil, dibawah satu persen, yaitu Kabupaten Dogiyai, Lanny Jaya, Deiyai, Yalimo, Paniai, dan Mamberamo Tengah. Dilihat dari karakteristik wilayahnya, kabupaten-kabupaten tersebut berada di wilayah pegunungan. Sementara itu Kota Jayapura dan Kabupaten Biak Numfor adalah dua wilayah yang memiliki TPT tertinggi yaitu di atas 10 persen. Beberapa kabupaten lain yang secara karakteristik merupakan wilayah perkotaan seperti Kabupaten Jayapura, Mimika, dan Nabire juga termasuk kabupaten dengan TPT yang cukup tinggi di Provinsi Papua.

**Gambar 11. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota, 2019**



Sumber: Sakernas 2019, data diolah

## KILM 9. Pengangguran Pada Kelompok Pemuda

Tingkat pengangguran memberikan gambaran kepada kita mengenai proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan tetapi secara aktif mencari pekerjaan dan bersedia untuk bekerja. Pengangguran pada kelompok usia muda merupakan salah satu masalah yang perlu mendapatkan perhatian khusus bagi banyak negara seiring dengan berjalannya proses pembangunan. Untuk tujuan indikator ini, istilah “usia muda” mencakup orang yang berusia 15-24 tahun, sedangkan “orang dewasa” didefinisikan sebagai orang yang berusia 25 tahun ke atas. Indikator pengangguran kaum muda disajikan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Tingkat pengangguran kaum muda
- 2) Tingkat pengangguran kaum muda sebagai persentase dari tingkat pengangguran dewasa
- 3) *Share* pengangguran kaum muda terhadap total
- 4) Pengangguran kaum muda sebagai proporsi dari populasi kaum muda

**Tabel 10. Indikator Pengangguran Usia Muda di Provinsi Papua, 2018-2019**

Indikator	2018	2019
<b>TPT Penduduk Usia Muda (%)</b>	<b>10,32</b>	<b>10,15</b>
LAKI-LAKI	11,53	11,35
PEREMPUAN	8,62	8,51
PERKOTAAN	28,36	25,49
PERDESAAN	5,47	5,93
<b>Rasio TPT Usia Muda Terhadap TPT Dewasa</b>	<b>9,57</b>	<b>4,40</b>
LAKI-LAKI	8,25	5,31
PEREMPUAN	12,05	3,33
PERKOTAAN	9,77	4,21
PERDESAAN	7,47	5,85
<b>Share Penganggur Muda Terhadap Total Penganggur (%)</b>	<b>53,35</b>	<b>47,55</b>
LAKI-LAKI	34,94	30,69
PEREMPUAN	18,41	16,85
PERKOTAAN	31,08	25,78
PERDESAAN	22,26	21,77

Sumber: Sakernas 2018-2019, data diolah

Pada Tabel 10 dapat dilihat bahwa selama periode Agustus 2018 ke Agustus 2019, terjadi penurunan TPT penduduk usia muda yaitu sebesar 0,17 persen. Diamati dari jenis kelamin, penurunan terjadi baik pada penganggur laki-laki maupun perempuan. Sementara itu, jika dilihat dari klasifikasi wilayahnya, TPT di perkotaan mengalami penurunan, sedangkan di perdesaan mengalami kenaikan.

Pada Agustus 2019, *share* penganggur muda terhadap total penganggur mengalami penurunan. Persentasenya menurun sekitar 5,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dari 53,35 persen menjadi 47,55 persen. Artinya, jika pada Agustus 2018 separuh lebih dari total penganggur merupakan usia muda, pada tahun sudah tidak lagi. Akan tetapi, persentasenya masih cukup besar. Ini mengindikasikan bahwa sebagian besar penduduk usia muda sudah masuk ke dalam angkatan kerja. Besar kemungkinan, mereka yang telah lulus pendidikan sudah aktif mencari pekerjaan demi pengalaman tetapi masih belum mendapatkan.

### **KILM 11. Pengangguran Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Indikator ini melihat hubungan antara pencapaian pendidikan pekerja dan pengangguran yang memberikan gambaran mengenai perubahan dalam permintaan pekerja. Informasi mengenai tingkat pengangguran berdasarkan pendidikan memiliki implikasi penting bagi pekerja dan kebijakan pendidikan. Jika dikonfirmasi bahwa orang dengan tingkat pendidikan yang rendah berada pada resiko yang lebih tinggi menjadi pengangguran, reaksi kebijakan yang mungkin adalah meningkatkan tingkat pendidikan mereka atau menciptakan lebih banyak pekerjaan dengan keterampilan yang lebih rendah (*low skilled job*) di dalam negeri. Di sisi lain, komposisi pengangguran yang lebih tinggi di kalangan orang-orang dengan pendidikan tinggi bisa menunjukkan kurangnya pekerjaan teknis yang profesional dan tingkat tinggi.

Tabel 11 menunjukkan bahwa, pada Agustus 2019 TPT tertinggi menurut pendidikan adalah pada jenjang Sekolah Tinggi dengan besaran mencapai 8,06 persen, disusul tingkat pendidikan sekolah Menengah (6,42 persen), Sekolah Dasar (2,87 persen), kemudian Kurang dari SD (0,72 persen). Secara umum, TPT mengalami kenaikan di semua tingkat pendidikan kecuali Kurang dari SD.

Dari analisis TPT menurut tingkat pendidikan ini dapat dilihat bahwa TPT cenderung lebih besar pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Fenomena ini dimungkinkan terjadi karena mereka yang berpendidikan tinggi memilih untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan selera dan kompetensinya, sementara lapangan usaha yang sesuai dengan itu tidak mencukupi jumlahnya. Di sisi lain, mereka yang berpendidikan rendah cenderung tidak terlalu selektif dan menerima apapun pekerjaan yang tersedia.

**Tabel 11. TPT Menurut Tingkat Pendidikan, 2018-2019**

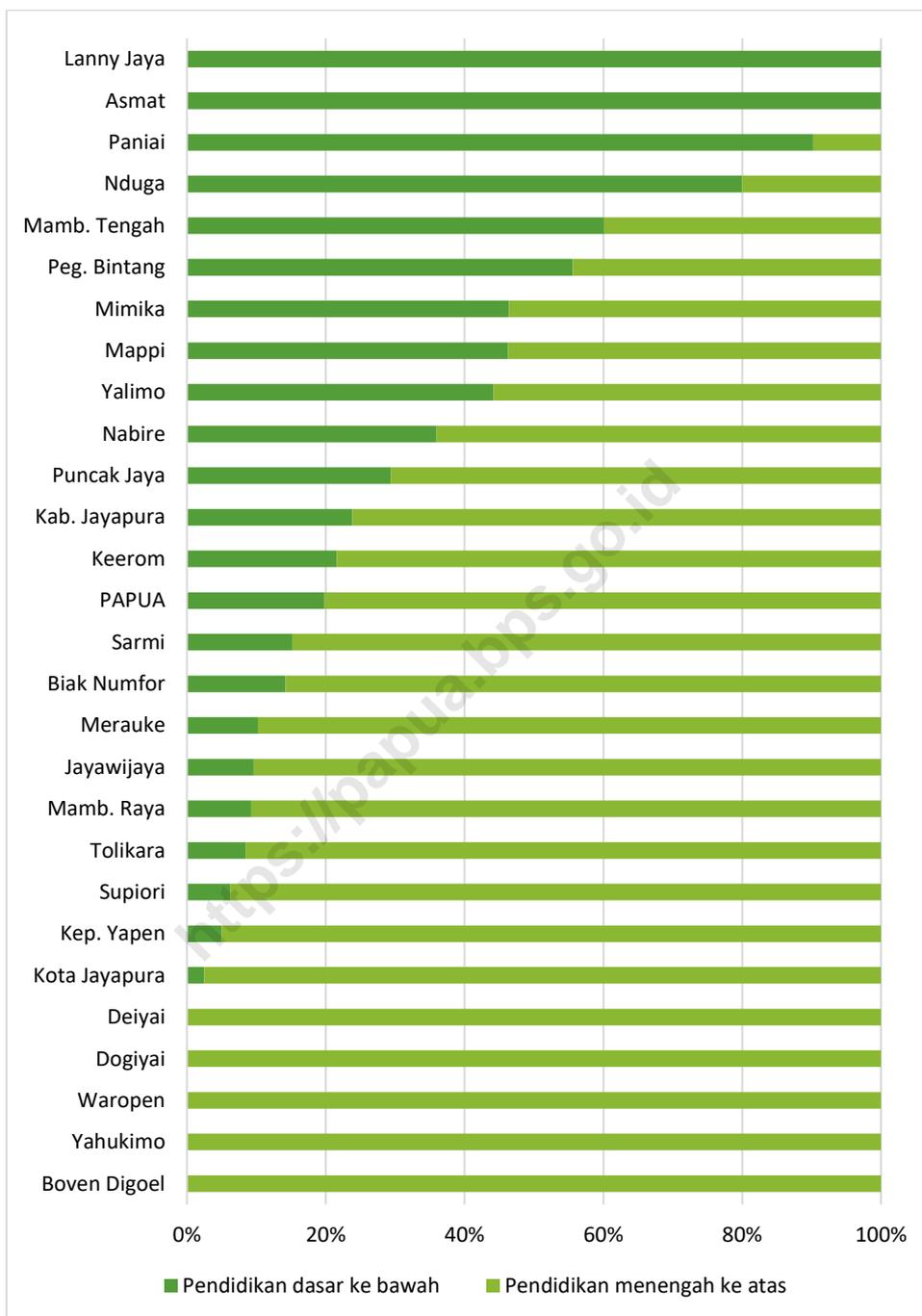
<b>Indikator</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3,20</b>	<b>3,65</b>
<b>KURANG DARI SD</b>	<b>0,87</b>	<b>0,72</b>
LAKI-LAKI	1,22	0,78
PEREMPUAN	0,56	0,66
PERKOTAAN	5,33	4,66
PERDESAAN	0,65	0,55
<b>SEKOLAH DASAR</b>	<b>1,27</b>	<b>2,87</b>
LAKI-LAKI	1,58	2,46
PEREMPUAN	0,86	3,45
PERKOTAAN	2,96	8,83
PERDESAAN	0,96	1,49
<b>SEKOLAH MENENGAH</b>	<b>5,87</b>	<b>6,42</b>
LAKI-LAKI	5,54	5,83
PEREMPUAN	6,73	8,00
PERKOTAAN	10,01	9,43
PERDESAAN	3,11	4,14
<b>SEKOLAH TINGGI</b>	<b>6,40</b>	<b>8,06</b>
LAKI-LAKI	4,61	6,59
PEREMPUAN	9,04	10,27
PERKOTAAN	7,78	9,00
PERDESAAN	3,93	6,46

Sumber: Sakernas 2018-2019, data diolah

Jika dipisahkan menurut jenis kelamin, Tabel 11 menunjukkan bahwa pada Agustus 2019, kecuali pada tingkat pendidikan Kurang dari SD, TPT perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Sementara itu, jika dilihat dari klasifikasi wilayah tempat tinggal, TPT perkotaan selalu lebih tinggi dibandingkan perdesaan di tingkat pendidikan apapun.

Sebaran nilai TPT berdasarkan kabupaten/kota dapat dilihat pada Gambar 12. Pada grafik tersebut tingkat pendidikan dibedakan menjadi dua yakni pendidikan dasar ke bawah dan pendidikan menengah ke atas.

**Gambar 12. Persentase Pengangguran Menurut Tingkat Pendidikan dan Kabupaten/Kota, 2019**



Sumber: Sakernas 2019, data diolah

Pada Agustus 2019 pengangguran di Provinsi Papua didominasi oleh penduduk yang mempunyai pendidikan menengah ke atas. Hal tersebut dapat terlihat dari dominasi warna hijau muda pada Gambar 12. Untuk Provinsi Papua sendiri, persentase penganggur dengan pendidikan menengah ke atas sekitar 80,15 persen. Sisanya, 19,85 persen berpendidikan dasar ke bawah.

## KILM 12. Setengah Penganggur

Mereka yang dikategorikan dalam setengah penganggur adalah mereka yang jumlah jam kerjanya di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam dalam seminggu) dan mereka masih mencari atau menerima pekerjaan tambahan untuk menambah jumlah jam kerjanya. Pada Agustus 2019 tercatat total setengah pengangguran di Provinsi Papua mencapai 779.286 jiwa. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan keadaan Agustus 2018 yang mencapai 740.469 jiwa. Dari total setengah pengangguran tersebut, proporsi antara laki-laki dan perempuan hampir sama yaitu 50,54 dan 49,46 persen. Sebagian besar (88,96 persen) setengah penganggur berada di wilayah perdesaan.

Persentase setengah penganggur terhadap angkatan kerja pada Agustus 2019 adalah 42,30 persen. Naik hampir dua persen dibandingkan Agustus 2018. Hal yang sama juga terjadi pada persentase setengah penganggur terhadap total penduduk bekerja yang mengalami kenaikan 2,24 persen dibanding kondisi Agustus 2018.

**Tabel 12. Indikator Setengah Penganggur, 2018-2019**

Indikator	2018	2019
<b>Persentase Setengah Penganggur Terhadap Angkatan Kerja</b>	<b>40,33</b>	<b>42,30</b>
LAKI-LAKI	35,08	36,10
PEREMPUAN	47,65	51,30
PERKOTAAN	16,27	18,70
PERDESAAN	48,06	50,16
<b>Persentase Setengah Penganggur Terhadap Total Penduduk Bekerja</b>	<b>41,66</b>	<b>43,90</b>
LAKI-LAKI	36,33	37,48
PEREMPUAN	49,04	53,23
PERKOTAAN	17,76	20,54
PERDESAAN	48,81	51,12

Sumber: Sakernas 2018-2019, data diolah

## KILM 13. Tingkat Ketidakaktifan

Tingkat ketidakaktifan adalah ukuran proporsi penduduk usia kerja suatu negara yang tidak terlibat aktif dalam pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan. Tingkat ketidakaktifan yang merupakan proporsi penduduk usia kerja yang tidak termasuk dalam angkatan kerja. Jika dijumlahkan dengan tingkat partisipasi angkatan kerja (lihat KILM 1), maka hasilnya adalah 100 persen, dengan perkataan lain tingkat ketidakaktifan sama dengan 1 dikurang TPAK (1-TPAK),

Dalam beberapa situasi, tingkat ketidakaktifan tinggi untuk kelompok populasi tertentu tidak harus selalu dilihat sebagai hal yang buruk. Sebagai contoh, tingkat ketidakaktifan yang relatif tinggi untuk wanita usia 25-34 tahun dimungkinkan terjadi karena mereka meninggalkan pasar kerja untuk mengurus keluarga dan melaksanakan tanggung jawab seperti halnya mengasuh anak. Dengan menggunakan data dalam KILM 13, dapat dilihat sejauh mana pola tenaga kerja perempuan dipengaruhi oleh mereka yang berstatus sebagai ibu. Telah lama diakui bahwa aspek-aspek struktur rumah tangga terkait dengan aktivitas pasar tenaga kerja. Misalnya, perempuan sebagai kepala rumah tangga cenderung memiliki tingkat aktivitas yang relatif tinggi. Pada pasangan yang menikah, suami biasanya memiliki tingkat ketidakaktifan yang rendah, terutama jika ada anak-anak dalam keluarga. Tingkat ketidakaktifan yang rendah pada wanita bisa berkorelasi dengan tingginya tingkat ketidakaktifan untuk laki-laki, yaitu suami. Jika laki-laki sedang menyelesaikan pendidikan atau secara fisik tidak mampu bekerja, maka istri berperan sebagai pencari nafkah utama,

**Tabel 13. Indikator Ketidakaktifan, 2018-2019**

Indikator	2018	2019
<b>Penduduk 15 tahun ke atas</b>	2.320.862	2.394.887
Laki-laki	1.236.571	1.268.591
Perempuan	1.084.291	1.126.296
Perkotaan	683.284	709.246
Perdesaan	1.637.578	1.685.641
<b>Bukan angkatan kerja</b>	484.899	552.684
Laki-laki	168.266	177.630
Perempuan	316.633	375.054
Perkotaan	236.829	249.180
Perdesaan	248.070	303.504
<b>Tingkat ketidakaktifan</b>	20,89	23,08
Laki-laki	13,61	14,00
Perempuan	29,20	33,30
Perkotaan	34,66	35,13
Perdesaan	15,15	18,01

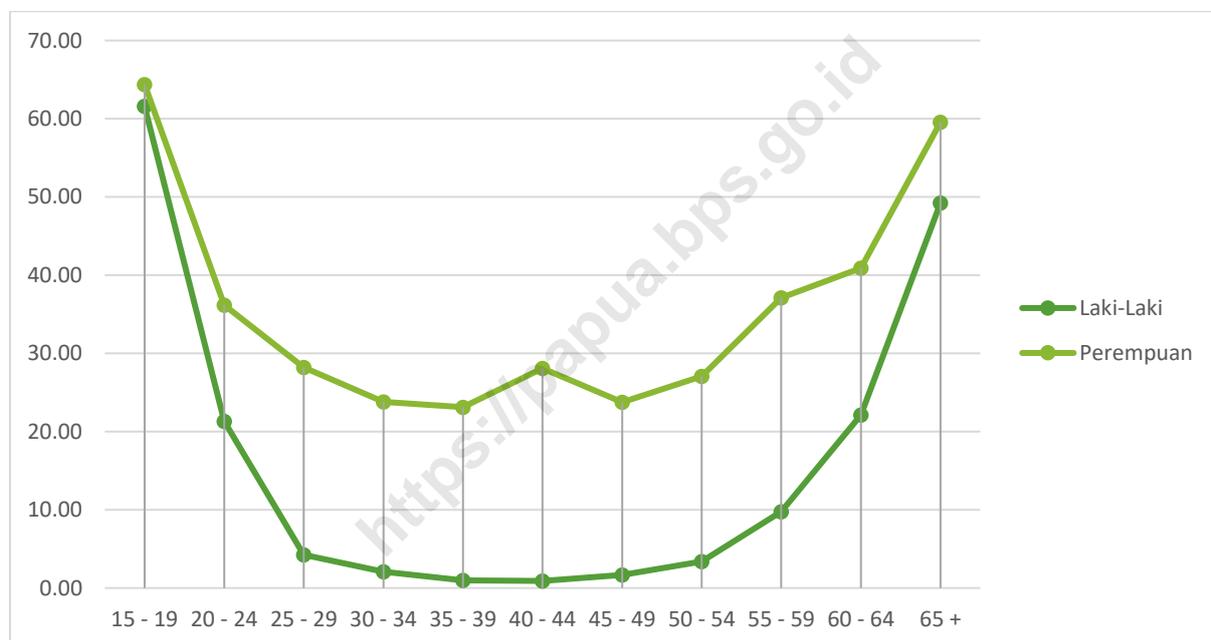
Sumber: Sakernas 2018-2019, data diolah

Pada periode Agustus 2018-2019 tingkat ketidakaktifan secara umum naik cukup signifikan, dari yang semula 20,89 persen pada Agustus 2018 menjadi 23,08 pada Agustus 2019. Berdasarkan jenis kelamin, tingkat ketidakaktifan baik pada laki-laki maupun perempuan mengalami kenaikan.

Pada perempuan, kenaikan yang terjadi lebih besar, yaitu sekitar 4,10 persen, dibanding laki-laki yang hanya 0,39 persen. Dilihat dari klasifikasi wilayah tempat tinggal, kenaikan tingkat ketidakaktifan di perdesaan (2,86 persen) lebih besar dibandingkan di perkotaan (0,47 persen).

Informasi lain terkait pola ketidakaktifan menurut kelompok umur dapat dilihat pada Gambar 13. Grafik yang membentuk huruf “u” menunjukkan bahwa tingkat ketidakaktifan tinggi pada kelompok usia muda, kemudian menurun di kelompok usia produktif, dan kembali naik pada kelompok usia tua. Pola ini terjadi baik pada laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi, dapat dilihat bahwa pada laki-laki, grafik menurun dengan lebih curam memasuki usia produktif. Dengan kata lain, tingkat ketidakaktifannya semakin rendah dan jauh lebih rendah dibanding perempuan.

**Gambar 13. Pola Tingkat Ketidakaktifan Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2019**



Sumber: Sakernas 2019, data diolah

### 3.4. INDIKATOR PENDIDIKAN DAN MELEK HURUF

#### KILM 14. Pencapaian Pendidikan dan Melek Huruf

Informasi tentang tingkat pencapaian pendidikan saat ini adalah indikator terbaik yang tersedia untuk melihat tingkat keahlian tenaga kerja. Pendidikan merupakan salah satu faktor penting untuk menilai kemampuan penduduk di suatu negara dalam bersaing di pasar dunia. Tabel KILM 14 menyajikan informasi mengenai tingkat pendidikan angkatan kerja dengan lima tingkat pendidikan yaitu tidak pernah bersekolah, tingkat pra-dasar, tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tinggi. Dalam publikasi ini, tingkat pendidikan hanya dikategorikan dalam empat tingkat pendidikan yaitu tidak pernah bersekolah, sekolah dasar, sekolah menengah dan sekolah tinggi.

**Tabel 14. Indikator Ketidakaktifan Menurut Pendidikan, 2018-2019**

<b>Indikator</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Tidak pernah sekolah</b>	<b>10,68</b>	<b>12,60</b>
Laki-laki	7,33	6,77
Perempuan	13,38	17,48
Perkotaan	34,09	38,54
Perdesaan	9,10	10,96
<b>Sekolah dasar</b>	<b>26,72</b>	<b>28,17</b>
Laki-laki	18,26	15,99
Perempuan	35,47	40,19
Perkotaan	43,47	41,49
Perdesaan	22,61	24,16
<b>Sekolah Menengah</b>	<b>29,61</b>	<b>33,48</b>
Laki-laki	17,53	19,70
Perempuan	48,82	54,46
Perkotaan	39,49	39,73
Perdesaan	21,03	27,85
<b>Sekolah Tinggi</b>	<b>5,93</b>	<b>11,38</b>
Laki-laki	5,93	8,28
Perempuan	17,57	15,66
Perkotaan	13,85	13,24
Perdesaan	5,44	7,99

Sumber: Sakernas 2018-2019, data diolah

Tabel 14 menunjukkan, bahwa dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2019 terjadi kenaikan tingkat ketidakaktifan penduduk usia kerja di Provinsi Papua di semua jenjang pendidikan. Kenaikan terbesar terjadi pada mereka yang berpendidikan Sekolah Tinggi, yaitu naik sekitar 5,45 persen dari Agustus 2018.

Apabila dilihat berdasarkan gender, pola yang sama dari tahun sebelumnya masih ditemui di tahun 2019. Tingkat ketidakaktifan pada penduduk perempuan selalu lebih tinggi dibanding laki-laki. Hal ini terjadi di semua tingkat pendidikan.

Dilihat berdasarkan wilayah tempat tinggal, tingkat ketidakaktifan di perkotaan masih lebih tinggi daripada perdesaan. Akan tetapi, jika dilihat secara lebih detil, kenaikan tingkat ketidakaktifan di perdesaan pada tahun 2019 lebih besar, terutama di tingkat pendidikan sekolah menengah yang naik sekitar 6,82 persen. Sementara itu, kenaikan tertinggi tingkat ketidakaktifan di perkotaan terjadi pada penduduk yang tidak pernah sekolah, yaitu naik sekitar 4,45 persen. Pada tingkat sekolah dasar dan sekolah tinggi, tingkat ketidakaktifan di perkotaan menurun.

L A M P I R A N

<https://papua.bps.go.id>

Lampiran 1. Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Tahun 2019

Kabupaten/kota	Laki-laki	Perempuan	Total
Merauke	86.768	80.199	166.967
Jayawijaya	81.551	78.558	160.109
Kabupaten Jayapura	51.615	44.934	96.549
Nabire	59.453	51.322	110.775
Kepulauan Yapen	36.852	33.999	70.851
Biak Numfor	56.161	52.672	108.833
Paniai	63.508	61.029	124.537
Puncak Jaya	55.683	42.635	98.318
Mimika	92.476	66.062	158.538
Boven Digoel	26.320	21.130	47.450
Mappi	33.249	32.819	66.068
Asmat	30.161	30.802	60.963
Yahukimo	66.588	64.909	131.497
Pegunungan Bintang	27.518	23.911	51.429
Tolikara	52.285	45.047	97.332
Sarmi	16.552	12.354	28.906
Keerom	23.417	18.599	42.016
Waropen	11.933	10.125	22.058
Supiori	7.373	6.135	13.508
Mamberamo Raya	7.851	6.950	14.801
Nduga	34.682	29.495	64.177
Lanny Jaya	61.567	58.580	120.147
Mamberamo Tengah	17.390	15.528	32.918
Yalimo	23.378	19.963	43.341
Puncak	42.239	40.853	83.092
Dogiyai	32.826	31.193	64.019
Intan Jaya	17.109	16.270	33.379
Deiyai	26.214	25.855	52.069
Kota Jayapura	125.872	104.368	230.240
<b>Provinsi Papua</b>	<b>1.268.591</b>	<b>1.126.296</b>	<b>2.394.887</b>

Lampiran 2. Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Menurut Kelompok Umur Tahun 2018 dan 2019

Indikator	2018	2019
<b>15 Tahun ke atas</b>	<b>2.320.862</b>	<b>2.394.887</b>
Laki-laki	1.236.571	1.268.591
Perempuan	1.084.291	1.126.296
Perkotaan	683.284	709.246
Perdesaan	1.637.578	1.685.641
<b>(15-24)</b>	<b>549.132</b>	<b>580.095</b>
Laki-laki	297.593	309.242
Perempuan	251.539	270.853
Perkotaan	170.758	174.267
Perdesaan	378.374	405.828
<b>(15-64)</b>	<b>2.268.964</b>	<b>2.336.264</b>
Laki-laki	1.206.651	1.234.313
Perempuan	1.062.313	1.101.951
Perkotaan	659.250	683.039
Perdesaan	1.609.714	1.653.225
<b>(25-54)</b>	<b>1.556.537</b>	<b>1.574.737</b>
Laki-laki	813.425	820.346
Perempuan	743.112	754.391
Perkotaan	430.402	443.392
Perdesaan	1.126.135	1.131.345
<b>(25-34)</b>	<b>614.852</b>	<b>625.481</b>
Laki-laki	318.329	321.794
Perempuan	296.523	303.687
Perkotaan	177.474	179.963
Perdesaan	437.378	445.518
<b>(35-54)</b>	<b>941.685</b>	<b>949.256</b>
Laki-laki	495.096	498.552
Perempuan	446.589	450.704
Perkotaan	252.928	263.429
Perdesaan	688.757	685.827
<b>(55-64)</b>	<b>163.295</b>	<b>181.432</b>
Laki-laki	95.633	104.725
Perempuan	67.662	76.707
Perkotaan	58.090	65.380
Perdesaan	105.205	116.052
<b>65 Tahun ke atas</b>	<b>51.898</b>	<b>58.623</b>
Laki-laki	29.920	34.278
Perempuan	21.978	24.345
Perkotaan	24.034	26.207
Perdesaan	27.864	32.416

Lampiran 3. Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2019

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Total
Merauke	73.091	40.530	113.621
Jayawijaya	71.893	64.875	136.768
Kabupaten Jayapura	40.813	22.928	63.741
Nabire	49.143	28.120	77.263
Kepulauan Yapen	29.633	20.576	50.209
Biak Numfor	41.385	23.574	64.959
Paniai	57.478	52.017	109.495
Puncak Jaya	50.665	25.375	76.040
Mimika	79.343	23.599	102.942
Boven Digoel	23.086	12.452	35.538
Mappi	27.549	17.750	45.299
Asmat	27.521	23.292	50.813
Yahukimo	61.876	46.157	108.033
Pegunungan Bintang	25.583	20.908	46.491
Tolikara	48.014	41.516	89.530
Sarmi	13.231	5.347	18.578
Keerom	20.502	11.593	32.095
Waropen	9.819	3.363	13.182
Supiori	6.175	3.101	9.276
Mamberamo Raya	6.891	3.575	10.466
Nduga	33.572	27.528	61.100
Lanny Jaya	55.635	55.498	111.133
Mamberamo Tengah	15.640	15.121	30.761
Yalimo	20.977	17.781	38.758
Puncak	36.920	29.115	66.035
Dogiyai	29.948	27.743	57.691
Intan Jaya	14.938	12.466	27.404
Deiyai	23.899	24.344	48.243
Kota Jayapura	95.741	50.998	146.739
<b>Provinsi Papua</b>	<b>1.090.961</b>	<b>751.242</b>	<b>1.842.203</b>

Lampiran 4. Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur, 2018-2019

Indikator	2018	2019
<b>15 Tahun ke atas</b>	<b>1.835.963</b>	<b>1.842.203</b>
Laki-laki	1.068.305	1.090.961
Perempuan	767.658	751.242
Perkotaan	446.455	460.066
Perdesaan	1.389.508	1.382.137
<b>(15-24)</b>	<b>303.623</b>	<b>314.659</b>
Laki-laki	178.101	181.662
Perempuan	125.522	132.997
Perkotaan	64.406	67.925
Perdesaan	239.217	246.734
<b>(15-64)</b>	<b>1.814.071</b>	<b>1.814.945</b>
Laki-laki	1.053.175	1.073.551
Perempuan	760.896	741.394
Perkotaan	439.968	451.876
Perdesaan	1.374.103	1.363.069
<b>(25-54)</b>	<b>1.385.727</b>	<b>1.363.258</b>
Laki-laki	794.669	802.048
Perempuan	591.058	561.210
Perkotaan	338.418	342.197
Perdesaan	1.047.309	1.021.061
<b>(25-34)</b>	<b>543.112</b>	<b>536.057</b>
Laki-laki	308.876	311.432
Perempuan	234.236	224.625
Perkotaan	138.268	138.521
Perdesaan	404.844	397.536
<b>(35-54)</b>	<b>842.615</b>	<b>827.201</b>
Laki-laki	485.793	490.616
Perempuan	356.822	336.585
Perkotaan	200.150	203.676
Perdesaan	642.465	623.525
<b>(55-64)</b>	<b>124.721</b>	<b>137.028</b>
Laki-laki	80.405	89.841
Perempuan	44.316	47.187
Perkotaan	37.144	41.754
Perdesaan	87.577	95.274
<b>65 Tahun ke atas</b>	<b>21.892</b>	<b>27.258</b>
Laki-laki	15.130	17.410
Perempuan	6.762	9.848
Perkotaan	6.487	8.190
Perdesaan	15.405	19.068

Lampiran 5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2019

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Total
Merauke	84,24	50,54	68,05
Jayawijaya	88,16	82,58	85,42
Kabupaten Jayapura	79,07	51,03	66,02
Nabire	82,66	54,79	69,75
Kepulauan Yapen	80,41	60,52	70,87
Biak Numfor	73,69	44,76	59,69
Paniai	90,51	85,23	87,92
Puncak Jaya	90,99	59,52	77,34
Mimika	85,80	35,72	64,93
Boven Digoel	87,71	58,93	74,90
Mappi	82,86	54,08	68,56
Asmat	91,25	75,62	83,35
Yahukimo	92,92	71,11	82,16
Pegunungan Bintang	92,97	87,44	90,40
Tolikara	91,83	92,16	91,98
Sarmi	79,94	43,28	64,27
Keerom	87,55	62,33	76,39
Waropen	82,28	33,21	59,76
Supiori	83,75	50,55	68,67
Mamberamo Raya	87,77	51,44	70,71
Nduga	96,80	93,33	95,21
Lanny Jaya	90,36	94,74	92,50
Mamberamo Tengah	89,94	97,38	93,45
Yalimo	89,73	89,07	89,43
Puncak	87,41	71,27	79,47
Dogiyai	91,23	88,94	90,12
Intan Jaya	87,31	76,62	82,10
Deiyai	91,17	94,16	92,65
Kota Jayapura	76,06	48,86	63,73
<b>Provinsi Papua</b>	<b>86,00</b>	<b>66,70</b>	<b>76,92</b>

Lampiran 6. Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2019

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Total
Merauke	71.602	39.057	110.659
Jayawijaya	69.047	64.451	133.498
Kabupaten Jayapura	38.240	19.333	57.573
Nabire	46.748	25.636	72.384
Kepulauan Yapen	27.598	19.709	47.307
Biak Numfor	36.620	21.570	58.190
Paniai	56.857	51.911	108.768
Puncak Jaya	49.955	24.732	74.687
Mimika	75.594	19.620	95.214
Boven Digoel	22.388	12.054	34.442
Mappi	26.352	16.906	43.258
Asmat	27.224	23.051	50.275
Yahukimo	60.248	45.610	105.858
Pegunungan Bintang	25.094	20.638	45.732
Tolikara	46.919	41.451	88.370
Sarmi	12.769	4.831	17.600
Keerom	19.765	11.399	31.164
Waropen	9.616	3.129	12.745
Supiori	5.896	2.946	8.842
Mamberamo Raya	6.641	3.511	10.152
Nduga	33.206	27.265	60.471
Lanny Jaya	55.635	55.361	110.996
Mamberamo Tengah	15.422	15.121	30.543
Yalimo	20.764	17.745	38.509
Puncak	36.920	29.115	66.035
Dogiyai	29.885	27.743	57.628
Intan Jaya	14.938	12.466	27.404
Deiyai	23.794	24.344	48.138
Kota Jayapura	85.182	43.406	128.588
<b>Provinsi Papua</b>	<b>1.050.919</b>	<b>724.111</b>	<b>1.775.030</b>

Lampiran 7. Ratio Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk (EPR) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2019

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Total
Merauke	82,52	48,70	66,28
Jayawijaya	84,67	82,04	83,38
Kabupaten Jayapura	74,09	43,03	59,63
Nabire	78,63	49,95	65,34
Kepulauan Yapen	74,89	57,97	66,77
Biak Numfor	65,21	40,95	53,47
Paniai	89,53	85,06	87,34
Puncak Jaya	89,71	58,01	75,96
Mimika	81,74	29,70	60,06
Boven Digoel	85,06	57,05	72,59
Mappi	79,26	51,51	65,47
Asmat	90,26	74,84	82,47
Yahukimo	90,48	70,27	80,50
Pegunungan Bintang	91,19	86,31	88,92
Tolikara	89,74	92,02	90,79
Sarmi	77,14	39,10	60,89
Keerom	84,40	61,29	74,17
Waropen	80,58	30,90	57,78
Supiori	79,97	48,02	65,46
Mamberamo Raya	84,59	50,52	68,59
Nduga	95,74	92,44	94,23
Lanny Jaya	90,36	94,50	92,38
Mamberamo Tengah	88,68	97,38	92,79
Yalimo	88,82	88,89	88,85
Puncak	87,41	71,27	79,47
Dogiyai	91,04	88,94	90,02
Intan Jaya	87,31	76,62	82,10
Deiyai	90,77	94,16	92,45
Kota Jayapura	67,67	41,59	55,85
<b>Provinsi Papua</b>	<b>82,84</b>	<b>64,29</b>	<b>74,12</b>

Lampiran 8. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pekerjaan Utama, 2019

Kabupaten/Kota	Bekerja dengan upah/gaji	Pengusaha	Berusaha sendiri+Berusaha dibantu buruh tak tetap/tak dibayar
Merauke	36.624	1.926	52.019
Jayawijaya	18.216	833	59.415
Kabupaten Jayapura	21.285	365	24.998
Nabire	28.315	1.517	33.928
Kepulauan Yapen	12.967	298	24.260
Biak Numfor	22.150	276	26.494
Paniai	4.909	257	56.237
Puncak Jaya	6.878	133	42.437
Mimika	44.669	779	41.316
Boven Digoel	18.387	501	10.477
Mappi	8.369	830	26.282
Asmat	7.244	658	29.217
Yahukimo	3.840	62	53.374
Pegunungan Bintang	5.947	145	18.350
Tolikara	6.896	122	43.677
Sarmi	6.075	957	6.940
Keerom	8.126	156	12.747
Waropen	5.602	-	6.304
Supiori	3.265	19	4.074
Mamberamo Raya	1.469	25	5.748
Nduga	-	-	28.333
Lanny Jaya	2.179	149	55.393
Mamberamo Tengah	1.716	-	13.260
Yalimo	2.805	-	21.195
Puncak	1.494	-	28.986
Dogiyai	1.901	-	37.083
Intan Jaya	1.652	-	14.544
Deiyai	479	-	24.783
Kota Jayapura	82.433	3.640	36.363
<b>Provinsi Papua</b>	<b>365.892</b>	<b>13.648</b>	<b>838.234</b>

Ket: - : *Not Available*) Data tidak tersedia.

Lampiran 8. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2019 (Lanjutan...)

Kabupaten/Kota	Pekerja Bebas	Pekerja Keluarga	Pekerja Rentan
Merauke	827	19.263	72.109
Jayawijaya	1.828	53.206	114.449
Kabupaten Jayapura	1.143	9.782	35.923
Nabire	1.708	6.916	42.552
Kepulauan Yapen	299	9.483	34.042
Biak Numfor	3.243	6.027	35.764
Paniai	3.284	44.081	103.602
Puncak Jaya	330	24.909	67.676
Mimika	1.424	7.026	49.766
Boven Digoel	375	4.702	15.554
Mappi	887	6.890	34.059
Asmat	686	12.470	42.373
Yahukimo	-	48.582	101.956
Pegunungan Bintang	93	21.197	39.640
Tolikara	76	37.599	81.352
Sarmi	1.314	2.314	10.568
Keerom	614	9.521	22.882
Waropen	225	614	7.143
Supiori	193	1.291	5.558
Mamberamo Raya	79	2.831	8.658
Nduga	-	32.138	60.471
Lanny Jaya	-	53.275	108.668
Mamberamo Tengah	-	15.567	28.827
Yalimo	-	14.509	35.704
Puncak	-	35.555	64.541
Dogiyai	333	18.311	55.727
Intan Jaya	22	11.186	25.752
Deiyai	-	22.876	47.659
Kota Jayapura	920	5.232	42.515
<b>Provinsi Papua</b>	<b>19.903</b>	<b>537.353</b>	<b>1.395.490</b>

Ket: - : *Not Available*) Data tidak tersedia.

Lampiran 9. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2019

Kabupaten/Kota	Pertanian	Manufaktur	Jasa-Jasa
Merauke	55.000	12.960	42.699
Jayawijaya	105.988	2.023	25.487
Kabupaten Jayapura	21.775	5.569	30.229
Nabire	20.171	7.969	44.244
Kepulauan Yapen	24.037	3.831	19.439
Biak Numfor	19.026	7.430	31.734
Paniai	95.640	1.700	11.428
Puncak Jaya	65.466	302	8.919
Mimika	19.670	22.117	53.427
Boven Digoel	17.323	7.091	10.028
Mappi	29.633	1.957	11.668
Asmat	37.698	1.998	10.579
Yahukimo	100.690	525	4.643
Pegunungan Bintang	38.794	330	6.608
Tolikara	77.267	1.401	9.702
Sarmi	6.861	2.592	8.147
Keerom	19.665	3.264	8.235
Waropen	4.803	1.536	6.406
Supiori	4.642	826	3.374
Mamberamo Raya	7.603	196	2.353
Nduga	60.471	0	0
Lanny Jaya	108.277	0	2.719
Mamberamo Tengah	28.827	0	1.716
Yalimo	35.584	40	2.885
Puncak	64.437	523	1.075
Dogiyai	55.283	0	2.345
Intan Jaya	24.557	173	2.674
Deiyai	47.435	27	676
Kota Jayapura	5.560	16.012	107.016
<b>Provinsi Papua</b>	<b>1.202.183</b>	<b>102.392</b>	<b>470.455</b>

Ket: - : *Not Available*) Data tidak tersedia.

Lampiran 10. Indikator Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Yang Termasuk Pekerja Paruh Waktu Menurut Kabupaten/Kota, 2019

Kabupaten/Kota	Pekerja Paruh Waktu	Tingkat Pekerja Paruh Waktu	Share Perempuan Pada Pekerja Paruh Waktu (Persen)
Merauke	44.089	39,84	55,44
Jayawijaya	60.062	44,99	46,70
Kabupaten Jayapura	25.287	43,92	50,52
Nabire	17.389	24,02	35,63
Kepulauan Yapen	18.401	38,90	48,73
Biak Numfor	21.128	36,31	46,47
Paniai	68.211	62,71	52,80
Puncak Jaya	49.963	66,90	69,06
Mimika	15.533	16,31	28,83
Boven Digoel	15.858	46,04	67,36
Mappi	27.389	63,32	71,51
Asmat	28.568	56,82	72,57
Yahukimo	65.041	61,44	82,82
Pegunungan Bintang	32.046	70,07	84,09
Tolikara	61.051	69,09	67,49
Sarmi	10.632	60,41	77,00
Keerom	11.196	35,93	54,96
Waropen	4.674	36,67	44,04
Supiori	4.945	55,93	64,49
Mamberamo Raya	6.370	62,75	79,55
Nduga	21.042	34,80	28,00
Lanny Jaya	37.381	33,68	25,96
Mamberamo Tengah	14.331	46,92	43,67
Yalimo	10.111	26,26	30,52
Puncak	43.619	66,05	97,15
Dogiyai	39.898	69,23	67,69
Intan Jaya	19.558	71,37	83,07
Deiyai	42.135	87,53	91,04
Kota Jayapura	18.677	14,52	25,61
<b>Provinsi Papua</b>	<b>834.585</b>	<b>47,02</b>	<b>55,41</b>

Lampiran 11. Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jumlah Jam Kerja, 2019

Kabupaten/Kota	0 Jam*	1-14 Jam	15-24 Jam
Merauke	3.140	10.080	16.134
Jayawijaya	461	3.771	11.471
Kabupaten Jayapura	1.886	6.215	11.067
Nabire	4.794	3.121	6.802
Kepulauan Yapen	1.482	1.495	7.170
Biak Numfor	857	1.984	8.488
Paniai	88	3.934	29.201
Puncak Jaya	991	12.503	22.716
Mimika	125	2.022	4.405
Boven Digoel	1.331	2.246	7.824
Mappi	1.312	8.339	10.509
Asmat	56	2.998	13.247
Yahukimo	0	2.437	24.831
Pegunungan Bintang	88	6.904	14.455
Tolikara	2.076	4.567	22.909
Sarmi	520	1.658	5.327
Keerom	306	1.815	4.651
Waropen	352	704	1.983
Supiori	316	1.554	2.045
Mamberamo Raya	458	2.126	2.667
Nduga	71	1.674	5.724
Lanny Jaya	0	177	2.948
Mamberamo Tengah	164	1.009	1.927
Yalimo	29	544	2.413
Puncak	0	1.610	28.043
Dogiyai	239	6.036	10.548
Intan Jaya	0	2.835	10.916
Deiyai	0	11.092	18.640
Kota Jayapura	2.659	5.141	4.982
<b>Provinsi Papua</b>	<b>23.801</b>	<b>110.591</b>	<b>314.043</b>

\*sementara tidak bekerja

Lampiran 11. Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jumlah Jam Kerja, 2019 (Lanjutan)

Kabupaten/Kota	25-34 Jam	35-39 Jam	40-48 Jam
Merauke	17.875	8.056	28.316
Jayawijaya	44.820	34.275	34.652
Kabupaten Jayapura	8.005	7.377	11.930
Nabire	7.466	8.560	25.410
Kepulauan Yapen	9.736	7.712	13.668
Biak Numfor	10.656	9.584	17.313
Paniai	35.076	30.776	7.033
Puncak Jaya	14.744	6.960	13.817
Mimika	9.106	9.681	29.511
Boven Digoel	5.788	4.607	8.409
Mappi	8.541	4.719	7.342
Asmat	12.323	8.518	8.613
Yahukimo	37.773	19.891	12.029
Pegunungan Bintang	10.687	7.706	3.929
Tolikara	33.575	11.671	12.917
Sarmi	3.647	2.047	2.556
Keerom	4.730	4.607	10.372
Waropen	1.987	3.098	3.593
Supiori	1.346	1.355	1.725
Mamberamo Raya	1.577	1.065	1.861
Nduga	13.644	28.239	11.076
Lanny Jaya	34.256	33.320	39.525
Mamberamo Tengah	11.395	7.186	8.862
Yalimo	7.154	17.302	11.067
Puncak	13.966	21.249	1.089
Dogiyai	23.314	8.977	8.078
Intan Jaya	5.807	5.247	2.471
Deiyai	12.403	5.086	.917
Kota Jayapura	8.554	9.256	52.800
<b>Provinsi Papua</b>	<b>409.951</b>	<b>328.127</b>	<b>390.881</b>

Lampiran 11. Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jumlah Jam Kerja, 2019 (Lanjutan)

Kabupaten/Kota	49-59 Jam	60 Jam Ke Atas
Merauke	12.972	14.086
Jayawijaya	1.522	2.526
Kabupaten Jayapura	5.406	5.687
Nabire	7.619	8.612
Kepulauan Yapen	2.513	3.531
Biak Numfor	3.951	5.357
Paniai	642	2.018
Puncak Jaya	986	1.970
Mimika	16.658	23.706
Boven Digoel	2.584	1.653
Mappi	899	1.597
Asmat	1.360	3.160
Yahukimo	8.294	603
Pegunungan Bintang	606	1.357
Tolikara	655	0
Sarmi	1.126	719
Keerom	3.089	1.594
Waropen	373	655
Supiori	159	342
Mamberamo Raya	77	321
Nduga	43	0
Lanny Jaya	770	0
Mamberamo Tengah	0	0
Yalimo	0	0
Puncak	49	29
Dogiyai	235	201
Intan Jaya	128	0
Deiyai	0	0
Kota Jayapura	17.122	28.074
<b>Provinsi Papua</b>	<b>89.838</b>	<b>107.798</b>

Lampiran 12. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Sektor Formal-Informal, 2019

Kabupaten/Kota	Formal	Informal
Merauke	34,84	65,16
Jayawijaya	14,27	85,73
Kabupaten Jayapura	37,60	62,40
Nabire	41,21	58,79
Kepulauan Yapen	28,04	71,96
Biak Numfor	38,54	61,46
Paniai	4,75	95,25
Puncak Jaya	9,39	90,61
Mimika	47,73	52,27
Boven Digoel	54,84	45,16
Mappi	21,27	78,73
Asmat	15,72	84,28
Yahukimo	3,69	96,31
Pegunungan Bintang	13,32	86,68
Tolikara	7,94	92,06
Sarmi	39,95	60,05
Keerom	26,58	73,42
Waropen	43,95	56,05
Supiori	37,14	62,86
Mamberamo Raya	14,72	85,28
Nduga	0,00	100,00
Lanny Jaya	2,10	97,90
Mamberamo Tengah	5,62	94,38
Yalimo	7,28	92,72
Puncak	2,26	97,74
Dogiyai	3,30	96,70
Intan Jaya	6,03	93,97
Deiyai	1,00	99,00
Kota Jayapura	66,94	33,06
<b>Provinsi Papua</b>	<b>21,38</b>	<b>78,62</b>

Lampiran 13. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota  
Dan Jenis Kelamin, 2019

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Total
Merauke	2,04	3,63	2,61
Jayawijaya	3,96	0,65	2,39
Kabupaten Jayapura	6,30	15,68	9,68
Nabire	4,87	8,83	6,31
Kepulauan Yapen	6,87	4,21	5,78
Biak Numfor	11,51	8,50	10,42
Paniai	1,08	0,20	0,66
Puncak Jaya	1,40	2,53	1,78
Mimika	4,73	16,86	7,51
Boven Digoel	3,02	3,20	3,08
Mappi	4,34	4,75	4,51
Asmat	1,08	1,03	1,06
Yahukimo	2,63	1,19	2,01
Pegunungan Bintang	1,91	1,29	1,63
Tolikara	2,28	0,16	1,30
Sarmi	3,49	9,65	5,26
Keerom	3,59	1,67	2,90
Waropen	2,07	6,96	3,32
Supiori	4,52	5,00	4,68
Mamberamo Raya	3,63	1,79	3,00
Nduga	1,09	0,96	1,03
Lanny Jaya	0,00	0,25	0,12
Mamberamo Tengah	1,39	0,00	0,71
Yalimo	1,02	0,20	0,64
Puncak	0,00	0,00	0,00
Dogiyai	0,21	0,00	0,11
Intan Jaya	0,00	0,00	0,00
Deiyai	0,44	0,00	0,22
Kota Jayapura	11,03	14,89	12,37
<b>Provinsi Papua</b>	<b>3,67</b>	<b>3,61</b>	<b>3,65</b>

Lampiran 14. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Pendidikan, 2019

Kabupaten/Kota	Pendidikan Dasar Ke Bawah	Pendidikan Menengah	Pendidikan Tinggi
Merauke	0,57	4,77	2,44
Jayawijaya	0,36	5,97	5,82
Kabupaten Jayapura	10,13	9,58	9,43
Nabire	9,16	5,81	4,21
Kepulauan Yapen	0,89	6,85	12,14
Biak Numfor	5,81	11,90	12,32
Paniai	0,85	0,00	3,14
Puncak Jaya	0,78	4,40	0,00
Mimika	13,41	5,19	6,63
Boven Digoel	0,00	4,46	8,02
Mappi	3,18	7,13	6,59
Asmat	1,29	0,00	0,00
Yahukimo	0,00	7,96	11,61
Pegunungan Bintang	1,20	1,90	5,21
Tolikara	0,14	1,88	15,21
Sarmi	2,43	5,93	9,06
Keerom	1,54	3,89	3,53
Waropen	0,00	4,79	5,16
Supiori	0,69	5,32	13,22
Mamberamo Raya	0,46	7,51	0,00
Nduga	0,93	1,87	-
Lanny Jaya	0,15	0,00	0,00
Mamberamo Tengah	0,57	0,00	6,48
Yalimo	0,40	0,51	4,30
Puncak	0,00	0,00	0,00
Dogiyai	0,00	0,70	0,00
Intan Jaya	0,00	0,00	0,00
Deiyai	0,00	0,93	0,00
Kota Jayapura	3,15	14,33	11,48

Ket: - : *Not Available*) Data tidak tersedia.

Lampiran 15. Persentase Pengangguran Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Pendidikan, 2019

Kabupaten/Kota	Pendidikan Dasar Ke Bawah	Pendidikan Menengah	Pendidikan Tinggi
Merauke	10,23	81,90	7,87
Jayawijaya	9,66	68,38	21,96
Kabupaten Jayapura	23,83	57,25	18,92
Nabire	35,97	50,44	13,59
Kepulauan Yapen	4,96	61,27	33,77
Biak Numfor	14,23	63,35	22,43
Paniai	90,23	0,00	9,77
Puncak Jaya	29,42	70,58	0,00
Mimika	46,42	42,47	11,12
Boven Digoel	0,00	79,29	20,71
Mappi	46,30	44,78	8,92
Asmat	100,00	0,00	0,00
Yahukimo	0,00	81,43	18,57
Pegunungan Bintang	55,60	19,76	24,64
Tolikara	8,45	25,86	65,69
Sarmi	15,24	58,08	26,69
Keerom	21,59	68,42	9,99
Waropen	0,00	71,40	28,60
Supiori	6,22	46,54	47,24
Mamberamo Raya	9,24	90,76	0,00
Nduga	79,97	20,03	0,00
Lanny Jaya	100,00	0,00	0,00
Mamberamo Tengah	60,09	0,00	39,91
Yalimo	44,18	18,07	37,75
Puncak	-	-	-
Dogiyai	0,00	100,00	0,00
Intan Jaya	-	-	-
Deiyai	0,00	100,00	0,00
Kota Jayapura	2,48	69,07	28,45

Ket: - : *Not Available*) Data tidak tersedia.

Lampiran 16. Persentase Setengah Penganggur Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Pendidikan, 2019

Kabupaten/Kota	Pendidikan Dasar Ke Bawah	Pendidikan Menengah	Pendidikan Tinggi
Merauke	63,42	34,32	2,26
Jayawijaya	52,14	29,18	18,68
Kabupaten Jayapura	15,69	79,04	5,27
Nabire	21,51	44,04	34,45
Kepulauan Yapen	34,69	56,44	8,87
Biak Numfor	34,06	57,91	8,02
Paniai	88,69	9,40	1,92
Puncak Jaya	81,81	15,44	2,76
Mimika	11,59	73,04	15,37
Boven Digoel	62,27	37,73	0,00
Mappi	74,23	24,88	0,89
Asmat	86,55	12,27	1,17
Yahukimo	37,92	53,62	8,46
Pegunungan Bintang	67,33	29,76	2,91
Tolikara	71,62	21,31	7,07
Sarmi	37,27	54,57	8,17
Keerom	51,70	44,22	4,08
Waropen	43,25	53,31	3,43
Supiori	54,30	30,08	15,62
Mamberamo Raya	39,86	60,14	0,00
Nduga	86,69	13,31	0,00
Lanny Jaya	61,86	30,79	7,35
Mamberamo Tengah	45,80	46,96	7,24
Yalimo	48,50	47,37	4,13
Puncak	97,77	2,23	0,00
Dogiyai	56,91	43,09	0,00
Intan Jaya	58,68	33,32	8,01
Deiyai	47,47	52,53	0,00
Kota Jayapura	23,80	65,32	10,88
<b>Provinsi Papua</b>	<b>62,43</b>	<b>31,77</b>	<b>5,80</b>

Lampiran 17. Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Yang Termasuk Bukan Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2019

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Total
Merauke	13.677	39.669	53.346
Jayawijaya	9.658	13.683	23.341
Kabupaten Jayapura	10.802	22.006	32.808
Nabire	10.310	23.202	33.512
Kepulauan Yapen	7.219	13.423	20.642
Biak Numfor	14.776	29.098	43.874
Paniai	6.030	9.012	15.042
Puncak Jaya	5.018	17.260	22.278
Mimika	13.133	42.463	55.596
Boven Digoel	3.234	8.678	11.912
Mappi	5.700	15.069	20.769
Asmat	2.640	7.510	10.150
Yahukimo	4.712	18.752	23.464
Pegunungan Bintang	1.935	3.003	4.938
Tolikara	4.271	3.531	7.802
Sarmi	3.321	7.007	10.328
Keerom	2.915	7.006	9.921
Waropen	2.114	6.762	8.876
Supiori	1.198	3.034	4.232
Mamberamo Raya	960	3.375	4.335
Nduga	1.110	1.967	3.077
Lanny Jaya	5.932	3.082	9.014
Mamberamo Tengah	1.750	407	2.157
Yalimo	2.401	2.182	4.583
Puncak	5.319	11.738	17.057
Dogiyai	2.878	3.450	6.328
Intan Jaya	2.171	3.804	5.975
Deiyai	2.315	1.511	3.826
Kota Jayapura	30.131	53.370	83.501
<b>Provinsi Papua</b>	<b>177.630</b>	<b>375.054</b>	<b>552.684</b>

Lampiran 18. Tingkat Ketidakaktifan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, Tahun 2019

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Total
Merauke	15,76	49,46	31,95
Jayawijaya	11,84	17,42	14,58
Kabupaten Jayapura	20,93	48,97	33,98
Nabire	17,34	45,21	30,25
Kepulauan Yapen	19,59	39,48	29,13
Biak Numfor	26,31	55,24	40,31
Paniai	9,49	14,77	12,08
Puncak Jaya	9,01	40,48	22,66
Mimika	14,20	64,28	35,07
Boven Digoel	12,29	41,07	25,10
Mappi	17,14	45,92	31,44
Asmat	8,75	24,38	16,65
Yahukimo	7,08	28,89	17,84
Pegunungan Bintang	7,03	12,56	9,60
Tolikara	8,17	7,84	8,02
Sarmi	20,06	56,72	35,73
Keerom	12,45	37,67	23,61
Waropen	17,72	66,79	40,24
Supiori	16,25	49,45	31,33
Mamberamo Raya	12,23	48,56	29,29
Nduga	3,20	6,67	4,79
Lanny Jaya	9,64	5,26	7,50
Mamberamo Tengah	10,06	2,62	6,55
Yalimo	10,27	10,93	10,57
Puncak	12,59	28,73	20,53
Dogiyai	8,77	11,06	9,88
Intan Jaya	12,69	23,38	17,90
Deiyai	8,83	5,84	7,35
Kota Jayapura	23,94	51,14	36,27
<b>Provinsi Papua</b>	<b>14,00</b>	<b>33,30</b>	<b>23,08</b>

Lampiran 19. Persentase Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Pendidikan, 2019

Kabupaten/Kota	Pendidikan Dasar Ke Bawah	Pendidikan Menengah	Pendidikan Tinggi
Merauke	46,81	44,78	8,41
Jayawijaya	63,60	27,38	9,02
Kabupaten Jayapura	22,77	57,82	19,42
Nabire	24,81	54,80	20,39
Kepulauan Yapen	32,21	51,71	16,08
Biak Numfor	25,54	55,49	18,97
Paniai	70,27	27,66	2,07
Puncak Jaya	67,38	28,53	4,10
Mimika	25,99	61,43	12,58
Boven Digoel	37,25	54,78	7,97
Mappi	65,61	28,30	6,10
Asmat	82,02	12,37	5,61
Yahukimo	76,18	20,60	3,22
Pegunungan Bintang	75,33	16,95	7,72
Tolikara	76,62	17,78	5,60
Sarmi	32,95	51,54	15,51
Keerom	40,73	51,07	8,20
Waropen	32,27	49,36	18,37
Supiori	42,34	40,94	16,72
Mamberamo Raya	60,62	36,25	3,13
Nduga	88,98	11,02	0,00
Lanny Jaya	84,55	12,82	2,63
Mamberamo Tengah	75,13	20,51	4,36
Yalimo	71,79	22,58	5,64
Puncak	95,90	3,15	0,95
Dogiyai	82,59	15,54	1,87
Intan Jaya	75,61	20,30	4,09
Deiyai	76,00	23,43	0,58
Kota Jayapura	9,74	59,60	30,66
<b>Provinsi Papua</b>	<b>56,87</b>	<b>33,70</b>	<b>9,43</b>

Lampiran 20. Tabulasi Silang Batas Kegiatan Formal dan Informal Berdasarkan Status Pekerjaan dan Jenis Pekerjaan Utama

STATUS PEKERJAAN	JENIS PEKERJAAN UTAMA									
	Tenaga Profesional	Tenaga Kepemimpinan	Pejabat Pelaksana dan Tata Usaha	Tenaga Penjualan	Tenaga Usaha Jasa	Tenaga Usaha Pertanian	Tenaga Produksi	Tenaga Operasional	Pekerja Kasar	Lainnya
Berusaha sendiri	F	F	F	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
Berusaha dibantu buruh tetap/Buruh dibayar	F	F	F	F	F	INF	F	F	F	INF
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/Buruh tidak dibayar	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Buruh/Karyawan/Pegawai	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Pekerja Bebas di Pertanian	F	F	F	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
Pekerja Bebas di Nonpertanian	F	F	F	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
Pekerja Keluarga/Tak dibayar	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF

# DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI PAPUA**

Jl. Dr. Sam Ratulangi Dok II Jayapura 99112  
Telepon: 0967-534519, 533028 (Hunting) Fax: 536490  
Email: [bps9400@bps.go.id](mailto:bps9400@bps.go.id) Homepage: [papua.bps.go.id](http://papua.bps.go.id)

ISBN 978-602-0963-53-2 (PDF)



9 786020 963532